



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA, KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667,
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpblambon@kkp.go.id

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

17 April 2026

SURAT PENGANTAR
Nomor : B.772/BPBLA/TU.140/IV/2025

No	Jenis Dokumen Yang dikirim	Banyaknya
1.	Penyampaian Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Triwulan I Tahun 2026	1 (satu) rangkap

Penerima
Nama Jabatan :

Pengirim
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tanda tangan dan cap
Nama :
Diterima tanggal :
No.Telepon :

Manijo



LAPORAN KINERJA Triwulan I_2026

**Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**



bpblambon@kkp.go.id

ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-ambon/



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kerjasama dari semua pihak yang terkait lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2026 yang tertuang dalam pelaksanaan program kerja sebagai upaya pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Laporan ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kegiatan lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon melalui program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2026 oleh setiap bagian di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Laporan kinerja ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Ambon, 17 April 2026

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi., M.Pi

Daftar ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	vii
Ringkasan Eksekutif	1
Bab I. Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Tugas dan Fungsi	5
1.4. Sumberdaya Manusia	7
1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja	8
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	10
Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja	12
2.1. Visi	12
2.2. Misi	13
2.3. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon	14
2.4. Penetapan Kinerja	16
2.5. Pengukuran Kinerja	20
Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	22
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	22
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	24
3.2.1. Sasaran kegiatan I, Terkelolanya Prasarana Dan Sarana Perikanan Budi Daya	24
3.2.2. Sasaran Kegiatan II, Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	26
3.2.3. Sasaran Kegiatan III, Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Tawar	44
3.2.4. Sasaran Kegiatan IV, Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	45
3.2.5. Sasaran kegiatan V, Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik	47
3.3. Akuntabilitas Keuangan	63
3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran	66
3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran	66

Bab IV. Penutup	68
4.1. Simpulan	68
4.2. Permasalahan/Kendala yang dihadapi	68
4.3. Langkah Perbaikan	68
Lampiran	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPBL Ambon Tahun 2026	6
Gambar 2.	Capaian Kinerja IKU BPBL Ambon Triwulan I tahun 2026	20
Gambar 3.	Calon induk Ikan Clownfish	29
Gambar 4.	Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih Ikan	35
Gambar 5.	Pengambilan sampel uji di lokasi pembudidaya	40
Gambar 6.	Tangkapan layar aplikasi SIDAK	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2026	7
Grafik 2.	Pendidikan Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2026	8
Grafik 3.	Golongan Pegawai (PNS/CPNS) Lingkup BPBL Ambon 2026	8
Grafik 4.	Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut	28
Grafik 5.	Capaian IKU Produksi Benih Ikan Laut Satker Laut	31
Grafik 6.	Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut.....	34
Grafik 7.	Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut	37
Grafik 8.	Capaian IKU Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	40
Grafik 9.	Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut	43
Grafik 10.	Capaian IKU Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker Laut	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon	15
Tabel 2.	Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2026	16
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan Pertama Tahun 2026	22
Tabel 4.	Capaian IKU Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	24
Tabel 5.	Capaian IKU Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)	27
Tabel 6.	Rincian Produksi Calon Induk Unggul Triwulan I	27
Tabel 7.	Capaian IKU Benih Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)	30
Tabel 8.	Capaian IKU Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	33
Tabel 9.	Bantuan benih ikan laut yang telah disalurkan BPBL Ambon	33
Tabel 10.	Capaian IKU Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut oleh BPBL Ambon (Sampel)	36
Tabel 11.	Capaian Jumlah Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	37
Tabel 12.	Capaian IKU Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)	39
Tabel 13.	Hasil Uji Sampel Monitoring Penyakit Ikan Laut Triwulan I 2026	39
Tabel 14.	Capaian IKU Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)	42
Tabel 15.	Hasil uji sampel AMR pada Triwulan I tahun 2026	43
Tabel 16.	Capaian IKU Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBL Ambon (Unit)	45
Tabel 17.	Capaian IKU Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	45
Tabel 18.	Capaian IKU Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	47
Tabel 19.	Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	50
Tabel 20.	Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	52
Tabel 21.	Capaian IKU Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	54
Tabel 22.	Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai).....	55
Tabel 23.	Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai).....	56

Tabel 24.	Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	57
Tabel 25.	Deskripsi Jenis Informasi Publik	58
Tabel 26.	Capaian IKU Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	59
Tabel 27.	Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	59
Tabel 28.	Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BPBL Ambon (Persen)	60
Tabel 29.	Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	62
Tabel 30.	Layanan Internal satker BPBL Ambon	62
Tabel 31.	Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja di triwulan I pada Tahun 2026 dan 2025	64
Tabel 32.	Data realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas Triwulan I tahun 2026	64

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (BPBL Ambon) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan perairan disekitarnya. Lingkup wilayah kerja BPBL Ambon meliputi wilayah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dan Papua. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas yakni mencakup Indonesia bagian timur, secara langsung berdampak pada besarnya tanggung jawab yang diemban dengan tugas pokok dalam hal budidaya laut dimana BPBL Ambon dituntut mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di bidang perikanan budidaya laut guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan kegiatan budidaya laut di wilayah kerja melalui peningkatan kinerja dan kebijakan program yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja BPBL Ambon Triwulan I tahun 2026 ini merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BPBL Ambon. Laporan Kinerja adalah dokumen evaluasi untuk mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBL Ambon dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Pada tahun 2026, BPBL Ambon menetapkan 5 sasaran kegiatan dan 20 indikator kinerja utama. Masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi balai. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2026, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 27.439.723.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang tertuang dalam DIPA Nomor: SP DIPA-032.04.2.567720/2026 tanggal 01 Desember 2025. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Maret tahun 2026 sebesar Rp. 5.010.930.137 (Lima Miliar sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau 18,26% dari total pagu anggaran. Proses pencapaian Indikator kinerja utama pada tahun 2026 IKU utama telah dicapai dan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah penjabaran persentase capaian IKU sampai dengan akhir Maret tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBL Ambon (Unit), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
2. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor) tercapai 40 ekor atau 133,33% dari target triwulan pertama;
3. Benih Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor) tercapai 47.870 ekor atau 159,57% dari target triwulan pertama
4. Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBL Ambon (Ekor) tercapai 150.000 ekor atau 100% dari target triwulan pertama;
5. Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut oleh BPBL Ambon (Sampel) tercapai 166 sampel atau 103,1% dari target triwulan pertama;
6. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel) tercapai 23 sampel atau 230% dari triwulan pertama;
7. Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel) tercapai 12 sampel atau 120% dari target triwulan pertama;
8. Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBL Ambon (Unit), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
9. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBL Ambon (Kg) tercapai 0 kg di akhir triwulan pertama;
10. Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
11. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester pertama;
12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen) tercapai 97,46% atau 113,33% dari target triwulan pertama;
13. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi satker BPBL Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester pertama dan kedua;
15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya satker BPBL Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;

16. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
17. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
18. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun.
19. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BPBL Ambon (Persen), tercapai 100% atau tercapai 129,87% dari target triwulan pertama;
20. Persentase Layanan Perkantoran (Persen) tercapai 100% atau 100% dari target triwulan pertama;

Indikator Kinerja Utama lingkup BPBL Ambon pada triwulan ini tahun 2026 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyusunan perencanaan dan kesesuaian pelaksanaan teknis di lapangan sehingga proses ketercapaian kinerja 2026 dapat dilaksanakan dengan baik.

Tindak lanjut penerapan rekomendasi adalah penyusunan target perencanaan kinerja di 2026 harus disusun sebaik mungkin dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis dimulai dari perencanaan, anggaran hingga pelaksanaan kegiatan prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

1.1. Latar Belakang

RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPN Tahun 2025-2045, telah mengamanatkan agar melakukan pembangunan berbagai bidang secara berkelanjutan. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu di dghm RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I merupakan penguatan transformasi yang meliputi (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; (iii) Transformasi Tata Kelola; (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (vi) Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana; dan (vii) Kestinambungan Pembangunan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, RKP Tahun 2025 berpedoman pada 8 Sasaran Pembangunan dan 5 Agenda Pembangunan. Selaras dengan RKP, pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan 5 arah kebijakan berbasis Ekonomi Biru yaitu Penambahan kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dengan masing-masing IKU seperti yang tercantum pada Renstra dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja antara lain :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kepada seluruh *stakeholders*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun anggaran 2025 dalam upaya perbaikan kinerja atas tahun sebelumnya; dan sebagai bahan inputan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.3. Tugas dan Fungsi

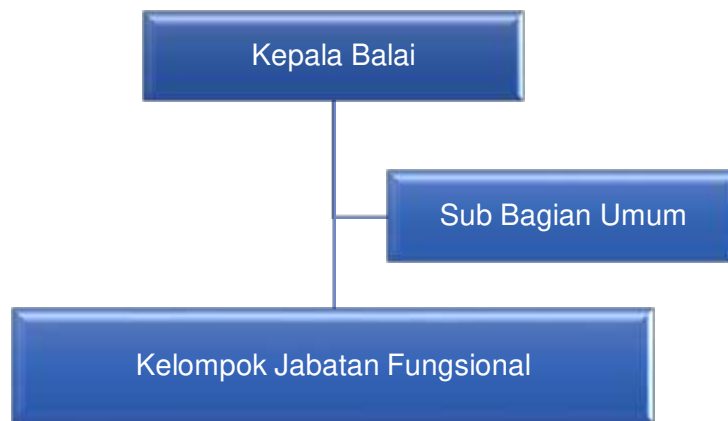
Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 6/PERMEN-KP/2014 yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. Pelaksanaan sertifikasi system perikanan budidaya laut;
5. Pelaksanaan kerjasama teknis budidaya laut;
6. Pengelolaan dan pelayanan system informasi dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menjadi Eselon IIIa dengan struktur organisasi terdiri atas:

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, tersaji pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Ambon Tahun 2026

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 1 Kasubag Umum, dan seluruh pegawai yang berjumlah 88 orang dengan kompetensi yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan tercapainya kinerja yang akuntabel.

Adapun tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi BPBL Ambon adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2. Kelompok Kerja

Tim Kelompok Kerja merupakan tim mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai IKU yang satker. Tim kerja terdiri dari pejabat fungsional umum dan tertertu yang menjalankan kegiatan kerekayasaan, pengujian, pendampingan, penerapan

standar/sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan benih/budidaya serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

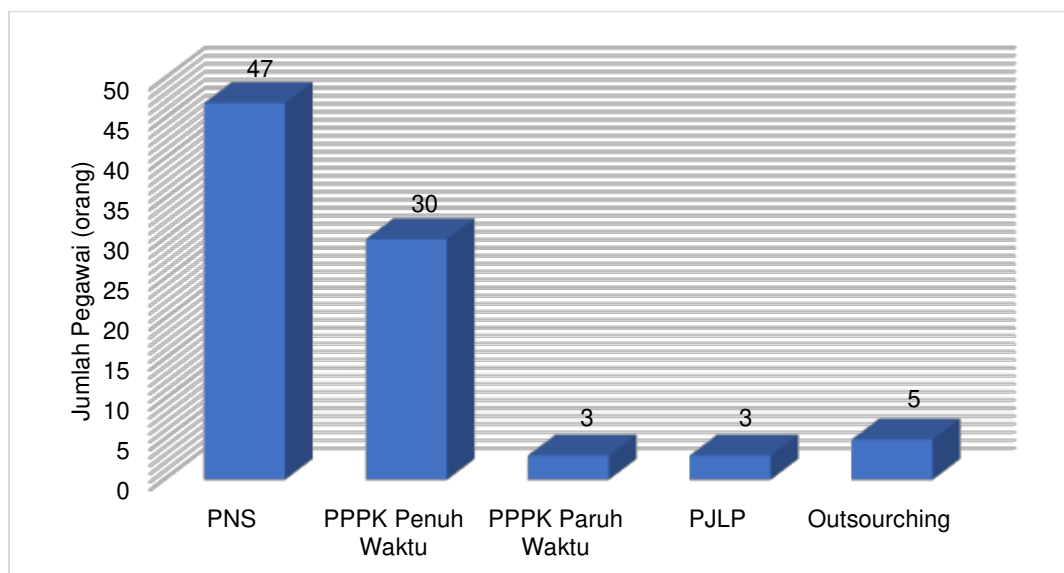
Pejabat fungsional tertentu di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon terdiri dari: Analis Akuakultur, Teknisi Akuakultur, Pengelola Kesehatan Ikan, Teknisi Kesehatan Ikan, Statistisi, dan Pranata Humas.

Selain 2 bagian utama yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon No. B.1/BPBLA/OT.210/I/2026 tentang Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun Anggaran 2026 terdiri dari 4 divisi yakni:

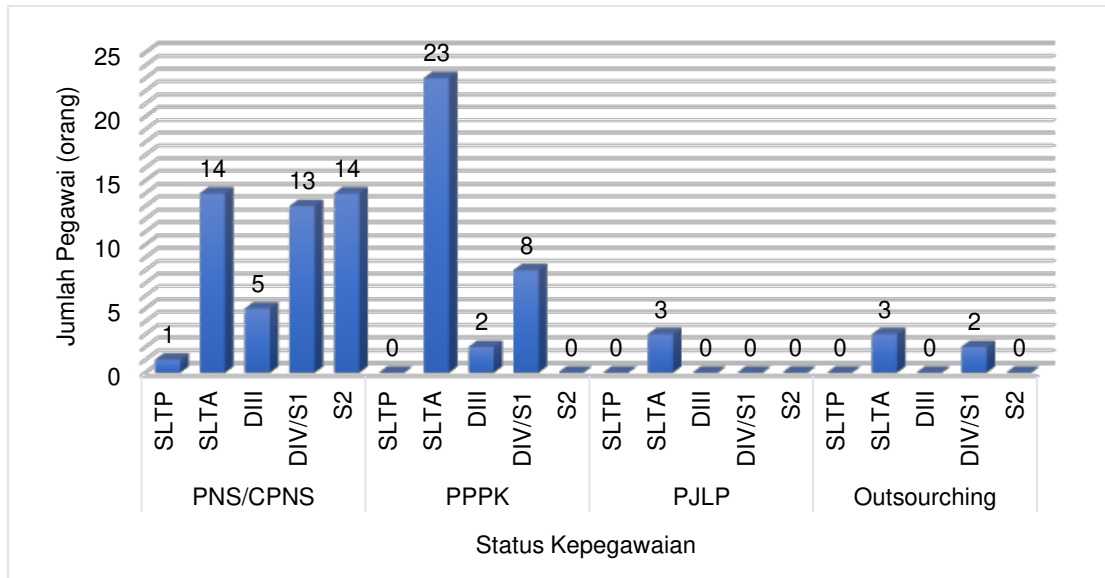
1. Divisi Produksi Benih Ikan Konsumsi
2. Divisi Produksi Ikan Hias dan Lobster
3. Divisi Produksi Calon Induk dan Rumput Laut
4. Divisi Pengelolaan Laboratorium

1.4. Sumberdaya Manusia

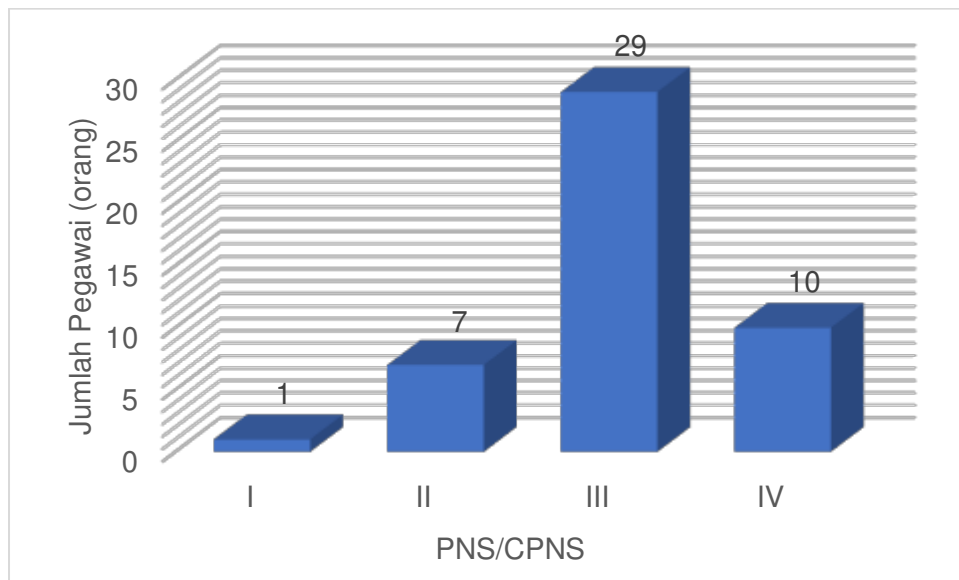
Jumlah Pegawai BPBL Ambon pada tahun 2026 terdiri dari 80 orang ASN (PNS dan PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu), 3 orang PJLP dan 5 Outsourcing yang diuraikan sebagai berikut:



Grafik 1. Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2026



Grafik 2. Pendidikan Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2026



Grafik 3. Golongan Pegawai (PNS/CPNS) Lingkup BPBL Ambon 2026

1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja

Pengembangan budidaya laut atau dikenal dengan Marikultur terus dikembangkan. Didukung dengan potensi yang cukup besar, marikultur juga dinilai akan dapat berkontribusi banyak untuk mendorong Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Secara umum Tahun 2024, total produksi ikan hasil budi daya mencapai 6,37 juta ton, meningkat 13,64% dari tahun sebelumnya. Sedangkan produksi rumput laut mencapai 10,80 juta ton, meningkat sebesar 10,82% dari tahun sebelumnya. Kenaikan produksi tersebut diikuti tren positif peningkatan nilai rata-rata pendapatan pembudidaya ikan.

Nilai rata-rata pendapatan pembudidaya mencapai Rp 5.136.547 atau meningkat sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya. KKP akan mendukung pengembangan budidaya tuna oleh investor di perairan Biak, Papua. Pengembangan budidaya dapat meningkatkan produksi tuna Indonesia yang saat ini sudah menyumbang 18 % dari produksi tuna global yang mencapai 8,27 juta ton. Dengan adanya tuna farming yang akan dilakukan oleh pelaku usaha maka akan mengurangi tekanan penangkapan tuna yang pada akhirnya akan menjaga kelestarian sumber daya tuna di masa mendatang.

Pengembangan kegiatan marikultur di wilayah kerja juga terus dilakukan guna mendukung peningkatan nilai produksi nasional khususnya produksi komoditas unggulan laut yang dikembangkan sampai saat ini.

Maluku menjadi salah satu provinsi kepulauan dengan potensi laut yang cukup besar, data menunjukkan potensi laut Maluku dapat mencapai 3,9 Juta ton dengan estimasi nilai perolehan sekitar Rp. 117 Triliun. Dengan kekayaan laut yang melimpah, sektor perikanan laut berpeluang besar dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam hal pengembangan budidaya laut di Maluku memiliki beberapa komoditas unggulan. Komoditas unggulan yang dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis penting antara lain beberapa jenis ikan kerapu, ikan kakap putih, dan ikan bubara atau Ikan Kuwe. Selain ikan konsumsi, ikan hias juga menjadi sektor andalan pengembangan budidaya. Ikan clownfish atau ikan badut atau banyak dikenal ikan nemo telah menjadi salah satu primadona komoditas ikan hias laut yang dibudidayakan. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon saat ini telah mampu mengembangkan teknologi budidaya ikan hias clownfish dengan melakukan hybridisasi induk sehingga diperoleh varian yang beraneka ragam corak dan warna, tercatat lebih dari 50 varian clownfish yang telah dihasilkan dan memiliki nilai jual tinggi dipasaran.

Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga tengah fokus dalam mengembangkan komoditas unggulan rumput laut. Budidaya rumput laut menggunakan teknik kultur jaringan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan produksi rumput laut di Indonesia. Teknik ini telah diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tujuan untuk menggenjot produksi rumput laut dan memperbaiki kualitas bibit rumput laut yang ada di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan produksi rumput laut, KKP juga telah membangun kawasan-kawasan sentra budidaya rumput laut di beberapa daerah seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Kawasan-kawasan ini sepenuhnya menggunakan bibit rumput laut hasil dari kultur jaringan. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi yang besar dalam pengembangan rumput laut. Kegiatan rumput

laut telah berkembang dan memerlukan dukungan untuk mengoptimalkan potensi lahan yang ada.

Bibit rumput laut hasil kultur jaringan juga telah disalurkan kepada kelompok pembudidaya dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil produksi rumput laut secara keseluruhan. Dengan penerapan teknik kultur jaringan, diharapkan produksi rumput laut di Indonesia dapat terus meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai produsen rumput laut nomor satu di dunia.

Beberapa isu dan permasalahan dalam pengembangan budidaya laut di wilayah timur Indonesia antara lain:

1. Penyediaan, distribusi induk dan benih berkualitas masih terbatas;
2. Mahalnya biaya pakan dalam budidaya;
3. Ancaman infeksi penyakit;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan budidaya sehingga berdampak rendahnya nilai produksi;
5. Implementasi konsep cara budidaya yang baik belum memadai sehingga produktifitas hasil budidaya masih belum maksimal;
6. Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya di wilayah kerja;
7. Masih rendahnya akses pasar yang menunjang pemasaran produk budidaya, dan
8. Akses permodalan bagi pembudidaya masih rendah.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini disajikan ringkasan mengenai tujuan, sasaran, capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta antisipasi untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan Laporan kinerja.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Rencana kinerja tahun 2026 dan indikator keberhasilan pencapaian penetapan kinerja berupa target program prioritas.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, pada bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK), evaluasi dan analisis capaian kinerja termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target serta hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan di tahun sebelumnya. Serta akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.

Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala serta upaya tindak lanjut untuk perbaikan tahun mendatang.

Lampiran, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.1. Visi

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara

negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Visi KKP adalah “Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2025-2029 sejalan dengan Visi Presiden serta Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai unit kerja yang berperan sentral dalam pembangunan subsektor perikanan budi daya, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendukung transformasi ekonomi biru melalui praktik budi daya yang efisien, adaptif terhadap perubahan iklim, dan inklusif bagi pelaku usaha skala kecil. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya turut mendorong peningkatan kapasitas produksi, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan penyediaan pangan akuatik berkualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan mandat dan peran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menetapkan visi jangka menengah tahun 2025–2029 sebagai berikut: “Perikanan Budi Daya yang Maju, Berkelanjutan, dan Tangguh untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat”.

2.2. Misi

Visi di atas dapat diwujudkan dengan pelaksanaan Misi Presiden dalam Asta Cita, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Mengacu pada mandat tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana kebijakan teknis di bidang perikanan budi daya, serta dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan visi Presiden melalui Asta Cita 2025–2029, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkomitmen melaksanakan misi pembangunan yang sejalan dengan Misi Asta Cita ke-2, 4, dan 5, yaitu:

1. Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Mendukung Asta Cita ke-2 dan 5)
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas (Mendukung Asta Cita ke-4)

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menetapkan misi sektoral tahun 2025–2029 sebagai arah pelaksanaan program dan strategi pembangunan subsektor perikanan budi daya yang mencerminkan keberpihakan terhadap produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan pelaku utama. Misi ini menjadi landasan dalam perumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang terukur.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029 adalah:

1. Meningkatkan produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan sebagai kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian pelaku utama perikanan budi daya.
3. Mengembangkan sistem usaha perikanan budi daya yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi.
4. Memperkuat tata kelola subsektor perikanan budi daya yang profesional, transparan, dan digital.

2.3. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

Mengacu pada sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya 2025 – 2029 sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan ditetapkan melalui tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang terbagi menjadi empat perspektif dalam bentuk peta sasaran strategis BPBL Ambon.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
• Terkelolanya Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	• Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)
• Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	• Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor) • Benih Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor) • Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBL Ambon (Ekor) • Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut oleh BPBL Ambon (Sampel) • Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel) • Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)
• Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	• Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBL Ambon (Unit)
• Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	• Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBL Ambon (Kg)
• Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	• Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) • Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks) • Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen) • Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai) • Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai) • Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai) • Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks) • Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai) • Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai) • Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BPBL Ambon (Persen) • Persentase Layanan Perkantoran (Persen)

2.3.1. Dukungan Anggaran

Dalam mendukung terlaksananya perencanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 27.439.723.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Berikut adalah komposisi penganggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2026:

Tabel 2. Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2026

NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	6.100.000.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	5.739.143.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	65.502.000
4.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	802.110.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	14.732.968.000
Total Anggaran BPBL Ambon Tahun 2026		27.439.723.000

2.4. Penetapan Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2026, adalah sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Manijo**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Manijo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terkelolanya Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	1.	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBL Ambon (Unit)	26
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	2.	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)	1.667
		3.	Benih Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)	46.667
		4.	Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBL Ambon (Ekor)	1.088.624
		5.	Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut oleh BPBL Ambon (Sampel)	700
		6.	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)	60
		7.	Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)	50
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	8.	Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBL Ambon (Unit)	1
4.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	9.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBL Ambon (Kg)	16.801
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	10.	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84,2
		11.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81,5
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)	86
		13.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi satker BPBL Ambon (Nilai)	76
		14.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92,1
		15.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya satker BPBL Ambon (Nilai)	71,75

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	16. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	4
	17. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	≥81
	18. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	81
	19. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BPBL Ambon (Persen)	77
	20. Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	100

DATA ANGGARAN :

No.	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Laut	5.739.143.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	802.110.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Tawar	65.502.000
4.	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	6.100.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	14.732.968.000
	Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon Tahun 2026	27.439.723.000

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Manijo

2.5. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim *Strategic Management Office* (Tim Pengelola Kinerja BPBL Ambon) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat;
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.
3. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.

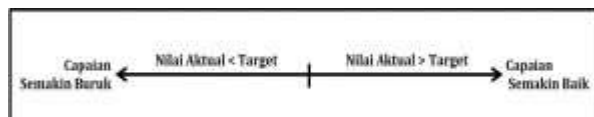
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian rata-rata indikator kinerja utama dan IKU pada tahun 2026 di triwulan pertama adalah sebesar 112,59 yang termasuk kategori Istimewa. Berikut adalah hasil tangkap layar capaian kinerja BPBL Ambon tahun Triwulan I tahun 2026 pada aplikasi Kinerjaku.



Gambar 2. Capaian Kinerja IKU BPBL Ambon Triwulan I tahun 2026

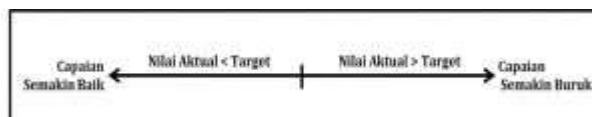
Polarisasi data menunjukkan ekspektasi (harapan) arah nilai aktual/realisasi dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target.

1. **Maximize:** Semakin tinggi nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kerjanya.



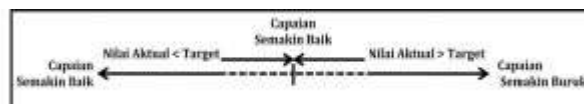
Contoh polarisasi data *maximize*.

2. **Minimize:** Semakin rendah nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kerjanya.



Contoh polarisasi data *minimize*.

3. **Stabilize:** Capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual/realisasi IKU mendekati target dalam suatu rentang tertentu.



Contoh polarisasi data *stabilize*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran capaian IKU, bab ini menguraikan tentang indikator kinerja kegiatan, penjelasan tentang capaiannya, kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya termasuk langkah antisipasi yang dilakukan pada tahun berjalan.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Keterangan
1.	Terkelolanya Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	26 unit	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)	1.667 ekor	30 ekor	40 ekor	Capain IKU ini mencapai 120% pada TW I
		Benih Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)	46.667 ekor	30.000 ekor	47.870 ekor	Capain IKU ini mencapai 120% pada TW I
		Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	1.088.624 ekor	150.000 ekor	150.000 ekor	Capaian IKU ini mencapai 100% pada TW I
		Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut oleh BPBL Ambon (Sampel)	700 sampel	161 sampel	166 sampel	Capaian IKU ini mencapai 103,1% pada TW I
		Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)	60 sampel	10 sampel	23 sampel	Capaian IKU ini mencapai 120% pada TW I
		Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)	50 sampel	10 sampel	12 sampel	Capaian IKU ini mencapai 120% pada TW I
3	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBL Ambon (Unit)	1 unit	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun

No.	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Keterangan
4.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	6.801 kg	-	-	Capaian IKU ini mencapai 0% pada TW I
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84,2	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81,5	-	-	Pengukuran dilakukan pada tiap akhir semester
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	86%	86%	97,46%	Capaian IKU ini 113,33% pada TW I
		Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	76	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92,1	-	-	Pengukuran dilakukan pada tiap akhir semester
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	71,75	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	4	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	≥81	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	81	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BPBL Ambon (Persen)	77%	77%	100%	Capaian IKU ini 120% pada TW I
		Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	100%	100%	100%	Capaian IKU ini 100% pada TW I

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Bagian berikut menguraikan tentang evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan dan analisis capaian kinerja dari sasaran kegiatan.

SASARAN KEGIATAN I : TERKELOLANYA PRASARANA DAN SARANA PERIKANAN BUDI DAYA

IKU 1 : Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)

Perikanan Budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan meningkatnya fenomena kenaikan kebutuhan pangan masyarakat yang aman dikonsumsi serta upaya dalam peningkatan gizi masyarakat. Usaha budidaya ikan air tawar memiliki prospek yang menjanjikan, komoditas ini mudah untuk dibudidayakan dan termasuk komoditas yang diminati oleh pasar. Dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 411 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Dan Prasarana Budi Daya Ikan Lele Atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2026, pada tahun 2026 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kembali mendapat tugas untuk mendistribusikan bantuan sarana produksi ikan sistem bioflok sebanyak 26 unit yang tersebar di beberapa provinsi di wilayah kerja.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit) di triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Capaian IKU Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Prasarana Dan Sarana Perikanan Budi Daya							
Nama Indikator : Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (unit)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)	Target	% Capaian			
0	0	0	26	0	0	100%	440

Capaian IKU ini di triwulan pertama yang masih rendah, namun nilainya relatif sama dengan capaian pada triwulan pertama tahun lalu. Kegiatan yang dilaksanakan di triwulan ini meliputi koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka persiapan dan kelengkapan administrasi dari calon penerima bantuan. Umumnya calon penerima

masih memerlukan bimbingan dan waktu dalam memenuhi syarat administrasi dan teknis sesuai petunjuk teknis bagi penerima bantuan.

Perhitungan capaian kegiatan IKU ini dilaksanakan di akhir tahun dengan melihat jumlah sarana yang telah disalurkan ke masyarakat dengan memenuhi ketentuan petunjuk teknis yang berlaku.

Perbandingan Kinerja

Perbandingan kinerja belum dapat dilakukan dikarenakan perhitungan capaian kegiatan IKU ini dilaksanakan di akhir tahun dengan melihat jumlah sarana yang telah disalurkan ke masyarakat dengan memenuhi ketentuan petunjuk teknis yang berlaku.

Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir triwulan ini terealisasi sebesar Rp. 97.699.142 dari pagu anggaran senilai Rp. 6.100.000.000 atau sebesar 1,60%. Penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan perjalanan dalam rangka identifikasi atau CPCL pada beberapa calon penerima bantuan yang telah direkomendasikan oleh anggota dewan dan dianggap telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBL Ambon secara umum telah dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pada triwulan ini telah dilakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi terhadap dokumen administrasi dan teknis. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik karena ditunjang dengan komunikasi aktif baik ditingkat internal seperti rapat rutin mingguan, maupun komunikasi langsung dengan pihak terkait setiap ada kendala yang muncul.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya percepatan realisasi bantuan sarana budidaya ikan system bioflok antara lain melalui koordinasi intensif dengan pihak anggota dewan dan dinas perikanan setempat, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi calon penerima bantuan pemerintah dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

SASARAN KEGIATAN II : TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT

IKU 2 : Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)

Produksi calon induk laut merupakan tahap penting dalam pengembangan budidaya perikanan laut yang berkelanjutan dan produktif. Calon induk adalah individu ikan atau biota laut lainnya yang dipersiapkan untuk menjadi indukan unggul yang mampu menghasilkan benih berkualitas tinggi. Keberhasilan pembenihan dan produktivitas dalam budidaya sangat bergantung pada kualitas induk yang digunakan. Permintaan terhadap produk perikanan laut terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein hewani. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya hayati laut dari alam mulai mengalami tekanan akibat penangkapan berlebih (*overfishing*), degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, produksi calon induk dari hasil budidaya menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap indukan dari alam serta menjaga kelestarian populasi liar.

Produksi calon induk laut tidak hanya menekankan pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada aspek genetik, kesehatan, dan kematangan reproduksi. Proses ini melibatkan manajemen pakan, lingkungan pemeliharaan, seleksi genetik, serta pencegahan dan pengendalian penyakit.

Dengan mempertimbangkan tantangan tersebut, produksi calon induk kakap dan ikan hias laut yang unggul dan sehat menjadi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan industri budidaya laut. Upaya ini mencakup pemeliharaan sejak fase pembesaran hingga dewasa, seleksi induk berdasarkan pertumbuhan, kualitas reproduksi, dan bebas penyakit, serta penerapan manajemen budidaya yang baik.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor) di triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Capaian IKU Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut							
Nama Indikator : Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (ekor)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)	Target	% Capaian			
30	40	133.33	1.667	2.4	50	80%	5.612

Capaian IKU Produksi Calon Induk Ikan Laut yang dilaksanakan satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2026 sebanyak 40 Ekor atau lebih dari 133,33% dari target triwulan I tahun 2026, sehingga target capaian kinerja untuk IKU ini telah mencapai target triwulanan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2026.

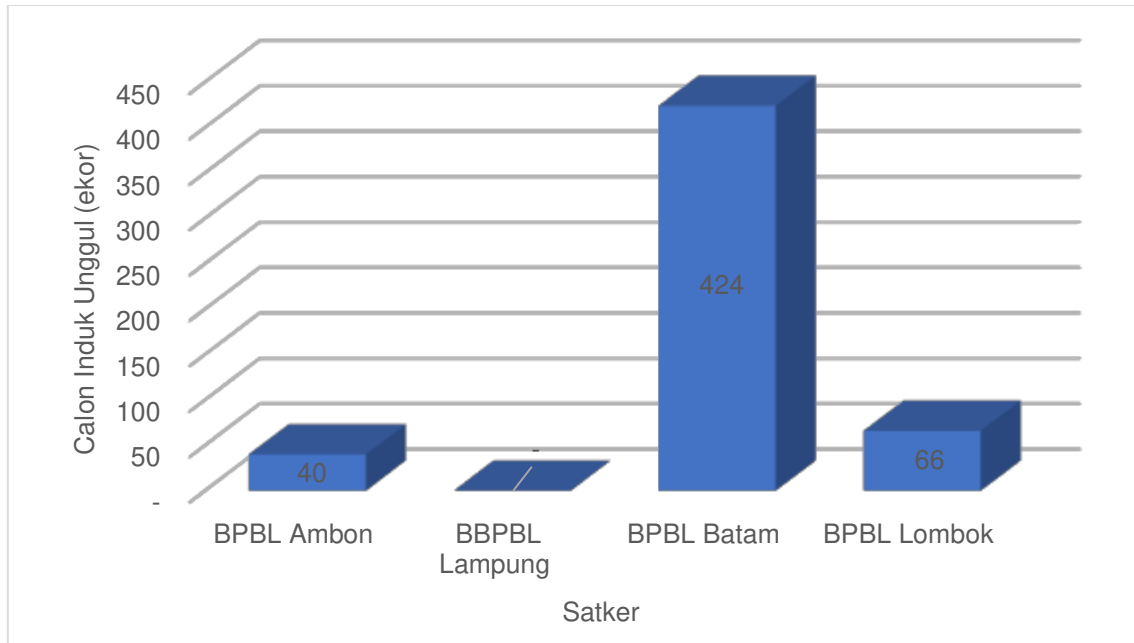
Tabel 6. Rincian Produksi Calon Induk Unggul Triwulan I

No.	Komoditas	Jumlah Komoditas
1.	Kakap Putih	-
2.	Clownfish	40 Ekor dengan ukuran minimal 4 cm.
3.	Kuwe,	-
4.	Kerapu	-

Sampai dengan bulan Maret 2026 produksi calon induk untuk kedua komoditas belum mencapai target yang di harapkan yaitu 300 gram untuk kakap putih dan namun untuk komoditas ikan hias clownfish telah mencapai ukuran 4 cm sebanyak 40 ekor. Untuk mendapatkan pertumbuhan ikan kakap dan ikan hias dilakukan pemberian pakan jenis rucah untuk ikan kakap dan pelet untuk ikan hias laut sampai ad libitum. Hal ini karena pada produksi ikan hias lebih awal dari ikan kakap. Penebaran ikan kakap dilakukan Desember 2025 di KJA. Hasil seleksi pertumbuhan kakap putih pada bulan Maret berat ikan mencapai rata rata 200 gram/ekor. Pertumbuhan ikan sangat berhubungan dengan kebutuhan pakan yang diberikan, selain faktor lingkungan. Calon induk ikan hias nemo yang ditargetkan ukuran panjang 3 cm, pada triwulan keempat tahun 2025, produksi calon induk ikan laut menghasilkan capaian produksi sesuai dengan ukuran ikan. Dari hasil produksi calon induk diduga dengan adanya perubahan kualitas air perairan di sekitar KJA, dimana terjadi penurunan suhu air akibat musim penghujan cukup tinggi di Teluk Ambon pergantian musim kemarau ke musim hujan berkisar 26 - 29°C dari suhu air sebelumnya rata-rata 30°C serta tingkat kecerahan air sangat rendah juli dan agustus 2 – 4 meter dibandingkan sebelumnya tingkat kecerahan air > 9 meter.

Perbandingan Kinerja

Capaian kegiatan IKU ini di triwulan I tahun 2026 sebesar 40 ekor atau mencapai 133,33% dari target triwulan. Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan yang sama di tahun lalu (50 ekor), menunjukkan nilai sedikit lebih rendah. Hal ini terkait dengan penyesuaian perencanaan kegiatan tahun 2026.



Grafik 4. Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Produksi calon induk ikan pada satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Lombok dan Batam pada triwulan I tahun 2026 berbeda beda, produksi calon induk ikan pada triwulan pertama tahun 2026 tertinggi dihasilkan oleh BPBL Batam dengan jumlah 424 ekor. Sementara itu BPBL Ambon memproduksi sebanyak 40 ekor calon induk, BPBL Lombok memproduksi sebanyak 66 ekor dan BBPBL Lampung belum ada produksi. Data tersebut menunjukkan setiap satker telah melaksanakan produksi calon induk berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan perencanaan dan tata kelola budidaya yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu perbedaan jenis komoditas budidaya yang dikembangkan berpengaruh pada jumlah calin yang diproduksi karena setiap komoditas memiliki karakteristik tersendiri seperti tingkat pertumbuhan, respon terhadap pakan hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.

Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir triwulan ini terealisasi sebesar Rp. 89.361.600 dari pagu anggaran senilai Rp. 382.841.000 atau sebesar 23,34%. Penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk operasional produksi calon induk seperti pakan ikan dan perlengkapan kerja.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Pertumbuhan calon induk ikan hias laut clownfish dan ikan kakap sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang diberikan serta penanganan selama di KJA. Produksi calon induk untuk ikan kakap belum mencapai ukuran calon induk yaitu 300 gr/ekor. Proses pertumbuhan tetap berlanjut, untuk mencapai ukuran 300 gr memerlukan waktu kurang lebih 6 - 7 bulan. Dari hasil kegiatan produksi calon induk ikan laut pada triwulan ini menunjukkan pertumbuhan baik, hal ini merupakan hasil kegiatan grading dan seleksi pertumbuhan yang cepat dari ikan kakap putih.

Pembesaran ikan clownfish (ikan badut) dilakukan dengan memindahkan benih ukuran 1,2–1,5 cm ke wadah pendederan (akuarium/fiberglass) dengan kepadatan 2-5 ekor/liter, lalu dipelihara menggunakan pelet berprotein tinggi selama 3-5 bulan hingga mencapai ukuran panen >4 cm. Manajemen kualitas air, pakan, dan grading berkala sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan.

Pemantauan kualitas air dengan cara melakukan pengukuran parameter meliputi salinitas, pH, suhu, oksigen terlarut dan kecerahan, Pengukuran parameter kualitas air dilakukan minimum 2 kali seminggu. Tindakan pencegahan sebenarnya merupakan tujuan utama dalam rencana pengendalian penyakit.



Gambar 3. Calon induk Ikan Clownfish

Rencana Tindak lanjut

Melaksanakan kegiatan produksi calon induk sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada untuk setiap jenis komoditas yang dipelihara, melakukan perbaikan terhadap sarana prasarana yang rusak serta melakukan upaya pencegahan dan pengobatan terhadap serangan penyakit yang muncul untuk meminimalisir terjadinya kematian komoditas yang dipelihara.

IKU 3 : Benih Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)

Produksi benih ikan laut merupakan tahap penting dalam pengembangan budidaya perikanan laut yang berkelanjutan dan produktif. Keberhasilan pembenihan dan produktivitas dalam budidaya sangat bergantung pada kualitas induk yang digunakan. Permintaan terhadap produk perikanan laut terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein hewani. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya hayati laut dari alam mulai mengalami tekanan akibat penangkapan berlebih (overfishing), degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, produksi benih ikan laut dari hasil budidaya menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan benih ikan tangkapan dari alam serta menjaga kelestarian populasi liar.

Namun, tantangan utama dalam pengembangan budidaya ikan laut adalah ketersediaan benih berkualitas tinggi yang konsisten, di mana saat ini sekitar 70-80% benih ikan laut masih bergantung pada tangkapan alam (wild capture), yang rentan terhadap overfishing dan fluktuasi musiman (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2022). Kegiatan produksi benih ikan laut melalui hatchery merupakan upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan tersebut, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendukung ekspor produk perikanan.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Benih Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor) di triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Capaian IKU Benih Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)

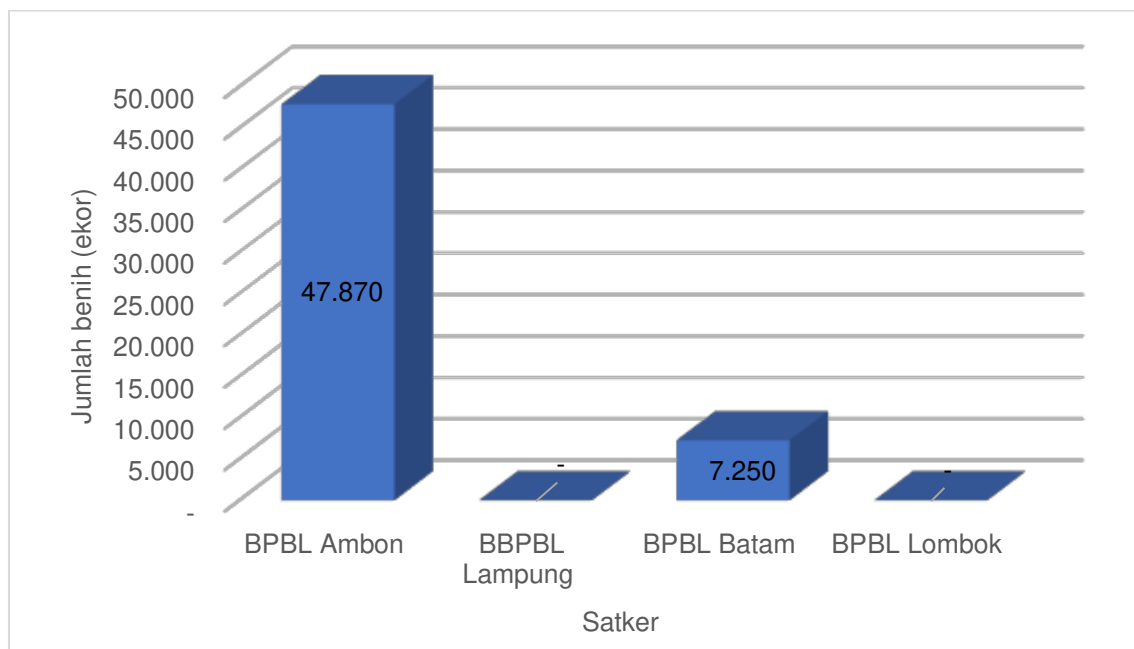
Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut							
Nama Indikator : Benih Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (ekor)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)	Target	% Capaian			
30.000	47.870	159.57	46.667	102.58	0	0%	773.771

Hasil produksi benih ikan laut pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada periode Januari sampai dengan Maret 2026 berupa benih ikan konsumsi dan ikan hias clown fish adalah produksi yang mendukung peningkatan nilai PNBP dan untuk mendukung kegiatan pembesaran guna menghasilkan calon induk yang berkualitas. Adapun target yang dicanangkan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sesuai dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2026 untuk Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sebesar 46.667 ekor.

Capaian IKU sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2026 sebanyak 47.870 ekor atau lebih dari 159,6% dari target triwulan I tahun 2026, sehingga target capaian kinerja untuk IKU ini telah mencapai target triwulanan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2026.

Perbandingan Kinerja

Produksi Benih Ikan Laut yang dilaksanakan satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon merupakan IKU baru ada di tahun ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian di triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.



Grafik 5. Capaian IKU Produksi Benih Ikan Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Produksi Benih Ikan Laut Satker Laut pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan capaian berbeda beda, produksi benih ikan pada triwulan pertama tahun 2026 tertinggi dihasilkan oleh BPBL Ambon dengan

jumlah 47.870 ekor disusul BPBL Batam memproduksi sebanyak 7.250 ekor sedangkan satker BPBL Lombok dan BBPBL Lampung belum ada capaian kegiatan.

Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir triwulan ini terealisasi sebesar Rp. 36.260.000 dari pagu anggaran senilai Rp. 196.000.000 atau sebesar 18,5%. Penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk operasional produksi benih ikan seperti pakan ikan, barang operasional dan perlengkapan kerja.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan capaian IKU ini ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya penerapan SOP kegiatan dengan tepat seperti produksi pakan alami, pemeliharaan larva dan benih, manajemen kesehatan ikan serta cepatnya upaya perbaikan terhadap kendala yang muncul di lapangan.

Rencana Tindak lanjut

Keberhasilan kegiatan produksi benih ikan laut yang ditentukan oleh pelaksanaan SOP dengan baik dan benar. Perlu adanya upaya perbaikan yang cepat dan tepat terhadap permasalahan yang timbul agar kegagalan dapat diminimalisir. Di triwulan kedepan diprediksi memasuki terjadi peralihan cuaca sehingga perlu upaya tambahan dalam menjalankan kegiatan produksi benih ikan seperti menjaga produksi pakan alami tetap berjalan, melakukan upaya pencegahan terjadinya serangan penyakit pada benih ikan.

IKU 4 : Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)

Bantuan benih ikan laut yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki latar belakang sebagai upaya strategis untuk mendukung pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Benih ikan merupakan faktor penting dalam kegiatan budidaya ikan, terutama bagi pembudidaya kecil yang sangat memerlukan benih bermutu yang dihasilkan dari induk unggul. Keterbatasan benih ikan berkualitas menjadi kendala yang menghambat peningkatan produksi perikanan budidaya, oleh karena itu program bantuan benih ikan menjadi prioritas utama KKP untuk memastikan tersedianya benih ikan bermutu secara cukup dan tepat waktu bagi masyarakat pembudidaya.

Adanya bantuan benih ikan laut bermutu, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pembudidaya, memperkuat ketahanan pangan, dan menambah stok sumber daya ikan di perairan umum. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan sebagai kontributor utama ekonomi kelautan Indonesia.

Sasaran dari bantuan Benih ikan laut adalah pembudidaya yang berada di Kawasan budidaya yang menjadi wilayah kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, serta tersalurkannya 1.088.624 Ekor benih ikan air laut kepada kelompok pembudidaya penerima bantuan.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor) di triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Capaian IKU Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut							
Nama Indikator : Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (ekor)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)	Target	% Capaian			
150.000	150.000	100	1.088.624	13.78	96.000	156.25%	4.560.469

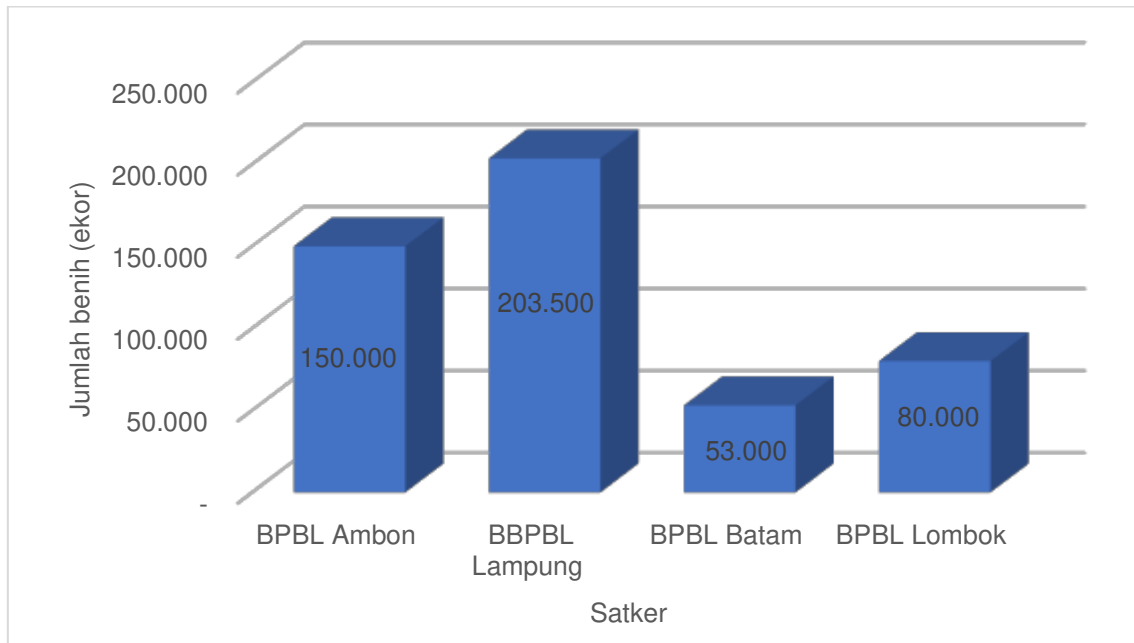
Kegiatan Bantuan benih ikan laut ini diharapkan dapat mendukung jaminan ketersediaan Benih ikan laut pada Kawasan budidaya secara berkesinambungan khususnya di Provinsi Maluku, Maluku Utara, provinsi provinsi di Pulau Sulawesi dan Papua.

Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2026, bantuan benih ikan laut mencapai 150.000 ekor dari target tahunan 1.088.624 ekor. Bantuan ini didistribusikan di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rincian bantuan benih ikan laut yang telah disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Bantuan Benih Ikan Laut yang Telah Disalurkan BPBL Ambon

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	Komoditas	Jumlah Benih (ekor)
1.	Sulawesi Selatan	Pinrang	1 kelompok	Kakap putih	50.000
2	Sulawesi Selatan	Maros	4 kelompok	Kakap putih	100.000

Perbandingan Kinerja



Grafik 6. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan capaian yang bervariasi, bantuan benih ikan laut pada triwulan pertama tahun 2026 tertinggi dihasilkan oleh BBPBL Lampung yakni sebanyak 203.000 ekor, disusul BPBL Ambon dengan jumlah 150.000 ekor lalu BPBL Lombok sebanyak 80.000 ekor dan BPBL Batam menyalurkan bantuan benih sebanyak 53.000 ekor ke masyarakat pembudidaya.

Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir triwulan ini terealisasi sebesar Rp. 1.585.852.300 dari pagu anggaran senilai Rp. 4.634.955.000 atau sebesar 34,22%. Penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk operasional produksi benih ikan laut seperti pakan ikan, bahan budidaya dan perlengkapan kerja serta untuk kegiatan distribusi bantuan ke lokasi penerima.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

IKU Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon pada triwulan ini tercapai melebihi target. Hal ini didukung dengan berjalannya kegiatan produksi benih yang berjalan dengan baik dan mampu menyediakan benih dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Disamping itu, dengan telah dibangunnya komunikasi yang baik dengan pihak terkait seperti dinas perikanan kabupaten/kota setempat dan

pembudidaya memberikan dampak terhadap kelancaran dalam pemenuhan dokumen dan penyaluran bantuan ke masyarakat.

Rencana Tindak lanjut

Secara umum, ada beberapa kendala yang berpotensi muncul dalam kegiatan ini seperti masalah teknis budidaya yang diantaranya kualitas perairan yang dapat menimbulkan serangan penyakit, penerapan teknik budidaya yang tidak tepat dan lokasi tujuan bantuan yang relatif jauh. Untuk mengantisipasi hal tersebut menuntut upaya peningkatan kualitas manajemen pakan, pengelolaan kualitas air, teknik budidaya yang lebih maju, serta pengendalian hama dan penyakit yang efektif untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan kakap putih dan pengaturan metode dan waktu pengiriman benih yang sesuai sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benih selamat sampai di lokasi penerima.



Gambar 4. Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih Ikan

IKU 5 : Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)

BPBL Ambon memiliki peran penting sebagai pusat pengembangan teknologi, produksi benih berkualitas, serta penyediaan pelayanan teknis untuk mendukung keberhasilan usaha budidaya laut di wilayah kerjanya. BPBL Ambon terutama fokus pada komoditas seperti kerapu, kakap putih, ikan bubara, clownfish dan rumput laut. Kualitas dan keberlanjutan usaha perikanan budidaya sangat bergantung pada dua hal utama, yaitu kesehatan ikan/benih dan kondisi lingkungan budidaya (air). Tanpa

pengawasan kualitas yang baik, usaha budidaya bisa mengalami kegagalan karena penyakit ikan atau penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pengujian sampel adalah kegiatan yang sangat penting dalam tugas dan fungsi BPBL Ambon.

Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan menurut Permen KP no 57 tahun 2018. Berdasarkan fungsinya, Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan pelayanan antara lain pemeriksaan kualitas air, kualitas tanah, penyakit ikan, dan pakan ikan dan pengujian kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, dan bakteri), residu, dan mutu pakan ikan serta diagnosa penyakit secara klinis dan laboratoris.

Aktivitas ini mencakup beberapa hal 1). Pengujian kesehatan ikan dan benih: Untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan mencegah penyakit serta hama yang bisa merugikan ekonomi. Sampel yang diuji meliputi jaringan ikan, benih, dan induk. 2). Pengujian kualitas air dan lingkungan budidaya: Untuk memantau kondisi fisik, kimia, dan biologis air di sekitar lokasi budidaya. Contohnya seperti suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut (DO), dan kandungan bakteri. Hasil pengujian ini sangat penting untuk memastikan kondisi air sesuai dengan standar mutu yang diperlukan untuk budidaya.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU IKU Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut oleh BPBL Ambon (Sampel) di triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Capaian IKU Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut oleh BPBL Ambon (Sampel)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut							
Nama Indikator : Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut oleh BPBL Ambon (Sampel)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (sampel)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)	Target	% Capaian			
161	166	103.1	700	23.71	275	60.36%	1.842

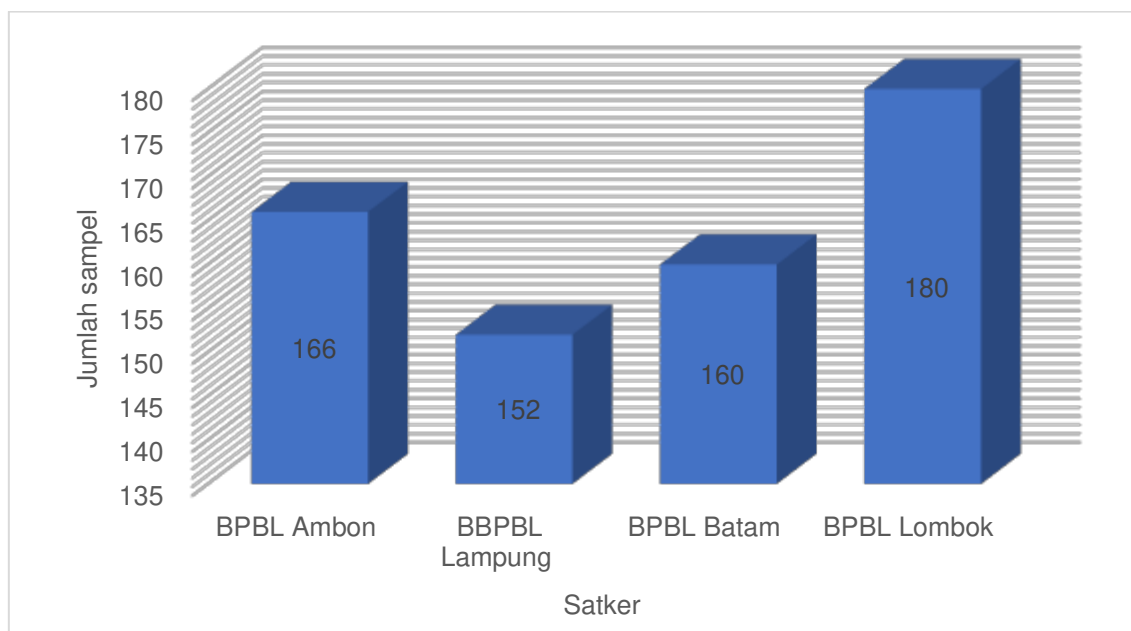
Capaian Persentase Pengujian sampel Kesehatan ikan dan lingkungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 103% terhadap target triwulan I tahun 2026. Hal ini didukung dengan realisasi rencana aksi berupa Sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang terdiri dari kualitas air, mikrobiologi dan biologi molekuler yang telah diujikan sampai dengan Maret 2026 diuji sebanyak 166 sampel atau tercapai 23,71%

terhadap target tahunan. Rincian capaian IKU ini di triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Capaian Jumlah Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan

No.	Uraian sampel	Jumlah sampel	Total sampel
1.	Kualitas air	141 sampel	166 sampel
2.	Mikrobiologi	13 sampel	
3.	Bio molekuler (virus)	12 sampel	

Perbandingan Kinerja



Grafik 7. Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan capaian yang relatif sama, Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut pada triwulan pertama tahun 2026 tertinggi capai oleh BPBL Lombok sebanyak 180 sampel, disusul BPBL Ambon sebanyak 166 sampel lalu BPBL Batam sebanyak 160 sampel dan terakhir BBPBL Lampung sebanyak 152 sampel.

Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir triwulan ini terealisasi sebesar Rp. 49.167.430 dari pagu anggaran senilai Rp. 185.735.000 atau sebesar 26,47%. Penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan peralatan kerja laboratorium dan barang persediaan barang uji laboratorium.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Capaian IKU ini tercapai melebihi target. Hal ini didukung dengan pemenuhan sampel uji berjalan dengan baik yang diambil di kegiatan perikanan budidaya seperti KJA dan panti pembenihan. Disamping itu, dengan telah dilakukan pengadaan bahan uji juga membantu dalam kelancaran proses pengujian sampel.

Rencana Tindak lanjut

Sampel uji berupa sampel ikan dan sampel air baik internal maupun eksternal. Kondisi sampel ikan harus masih segar, baru mati, atau masih hidup dan belum busuk. Sampel uji internal diperoleh dari sampel ikan dari unit-unit produksi internal melalui pengambilan sampel aktif secara purposive (ditentukan) yaitu ikan yang diduga terkena infeksi patogen. Sementara sampel eksternal diperoleh dari pihak luar yang memasukkan sampelnya untuk diuji.

IKU 6 : Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)

Penyakit ikan merupakan salah satu kendala dalam usaha perikanan budidaya. Hal ini disebabkan karena wabah penyakit dapat menimbulkan kematian ikan maupun udang budidaya. Tingginya Tingkat kematian ikan budidaya dapat menurunkan produksi perikanan sehingga nilai pendapatan yang diperoleh menjadi turun jika dibandingkan dengan jumlah modal yang harus dikeluarkan untuk keperluan budidaya seperti pembelian benih, pakan, pembuatan keramba jaring apung/kolam/tambak, upah tenaga kerja dan lain sebagainya. Disamping itu, ikan yang sakit juga akan memiliki nilai jual yang jauh lebih rendah dari kondisi normal terlebih untuk ikan-ikan yang dijual dalam kondisi hidup seperti ikan kerapu.

Berdasarkan penyebabnya, penyakit pada ikan terdiri dari penyakit infeksi dan penyakit non infeksi. Penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi patogen ke dalam tubuh inang seperti virus, bakteri, parasit dan jamur. Sedangkan penyakit non infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh selain infeksi patogen misalnya penurunan kualitas lingkungan, kekurangan pakan (malnutrisi), dan cacat secara genetik.

Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon merupakan laboratorium yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian dan diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan. Selain itu Laboratorium Kesehatan ikan dalam perannya mendukung kegiatan budidaya juga melakukan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan di wilayah kerja BPBL

Ambon guna mendapatkan data sebaran penyakit, pengendalian dan rekomendasi pengendalian.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut oleh BPBL Ambon (Sampel) di triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Capaian IKU Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut							
Nama Indikator : Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (sampel)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)	Target	% Capaian			
10	23	230	60	38.33	9	255.56%	340

Capaian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 120%. Hal ini didukung dengan realisasi rencana aksi berupa Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh BPBL Ambon yang telah diujikan sampai dengan bulan Maret 2026 diuji sebanyak 23 sampel atau tercapai 120,00%. Monitoring penyakit ikan laut pada triwulan I dilaksanakan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Lokasi yang dikunjungi adalah kobisonta, Sawai, Olong dan tambak udang PT. Wahana Lestasi Investama Arara. Komoditas yang ditemukan pada Lokasi tersebut adalah ikan kakap putih, ikan kuwe dan udang vaname. Adapun rincian hasil uji sampel monitoring penyakit ikan laut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Sampel Monitoring Penyakit Ikan Laut Triwulan I 2026

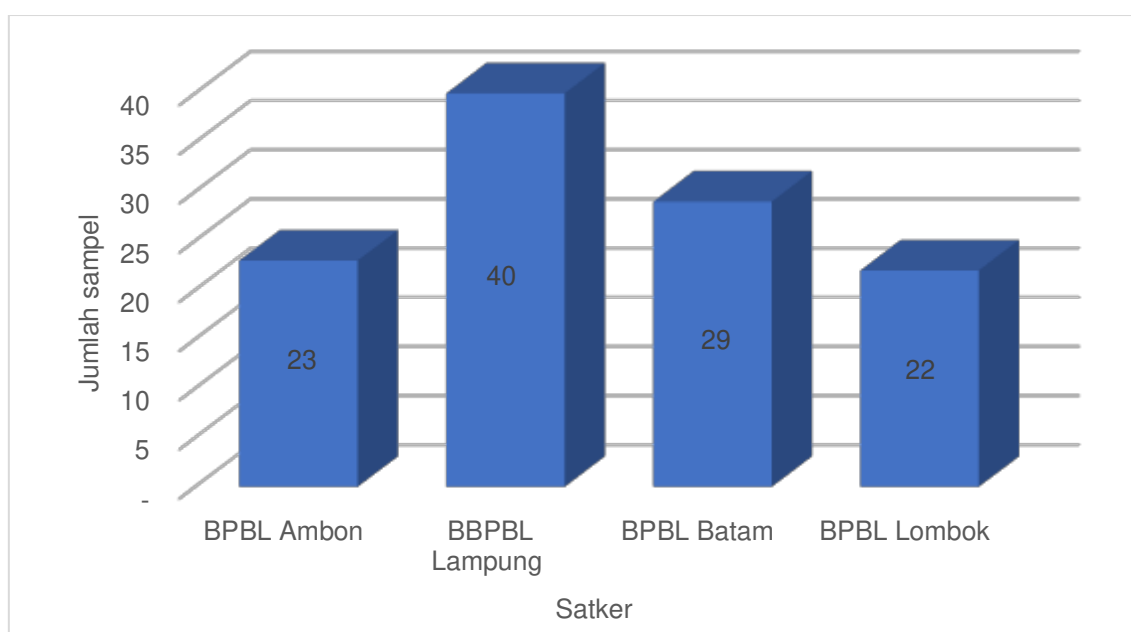
No.	Nama Pokdakan	Lokasi	Komoditas	Hasil Uji sampel
1.	Kepiting Jaya	Kobisonta	Kakap putih	Negatif VNN
2.	Kepiting Jaya	Kobisonta	Kakap putih	<i>Vibrio alginolitycus</i>
3.	Kepiting Jaya	Kobisonta	Bubara	Negatif Irido
4.	Kepiting Jaya	Kobisonta	Bubara	<i>Vibrio parahaemolitycus</i>
5.	Udin	Kobisonta	Bubara	Negatif VNN
6.	Udin	Kobisonta	Bubara	Pseudomonas
7.	Udin	Kobisonta	Kakap putih	Negatif Irido
8.	Komar	Kobisonta	Kakap putih	Negatif Irido
9.	Komar	Kobisonta	Bubara	<i>Vibrio parahaemolitycus</i>
10.	Hambali	Sawai	Bubara	<i>Vibrio alginolitycus</i>
11.	Hambali	Sawai	Bubara	<i>Vibrio alginolitycus</i>
12.	Hambali	Sawai	Kakap putih	Negatif Irido
13.	Mina Lia	Sawai	Bubara	Negatif VNN

No.	Nama Pokdakan	Lokasi	Komoditas	Hasil Uji sampel
14.	Mina Lia	Sawai	Bubara	<i>Vibrio fluvinicus</i>
15.	Ismail	Sawai	Bubara	Negatif Irido
16.	Ismail	Sawai	Bubara	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
17.	Ismail	Sawai	Bubara	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
18.	Bumdes Olong	Olong	Bubara	Negatif Irido
19.	Bumdes Olong	Olong	Bubara	Benedenia
20.	Bumdes Olong	Olong	Bubara	<i>Aeromonas caviae</i>
21.	Wahana Lestari Investama	Arara	Udang	Negatif AHPND
22.	Wahana Lestari Investama	Arara	Udang	Negatif AHPND
23.	Wahana Lestari Investama	Arara	Udang	Negatif AHPND
Total : 23 sampel				



Gambar 5. Pengambilan sampel uji di lokasi pembudidaya

Perbandingan Kinerja



Grafik 8. Capaian IKU Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh Satker Laut pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan capaian yang relatif bervariasi, Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji Satker Laut pada triwulan pertama tahun 2026 tertinggi capai oleh BPBL Lampung sebanyak 40 sampel, disusul BPBL Batam sebanyak 29 sampel, lalu BPBL Ambon sebanyak 23 sampel dan terakhir BPBL Lombok sebanyak 22 sampel yang telah diuji.

Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir triwulan ini terealisasi sebesar Rp. 0 dari pagu anggaran senilai Rp. 71.436.000 atau sebesar 0%.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Capaian IKU ini tercapai melebihi target. Hal ini didukung dengan pengambilan dan pengujian sampel yang diperoleh dari kegiatan budidaya di wilayah kerja seperti di Kabupaten Maluku Tengah. Pemilihan lokasi pengambilan sampel juga disesuaikan dengan lokasi dan ketersediaan anggaran, waktu dan tenaga.

Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan kedepan dengan melakukan kegiatan Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh satker sesuai perencanaan dengan mengunjungi lokasi budidaya dan menguji sampel penyakit ikan yang dikumpulkan sesuai metode uji di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon.

IKU 7 : Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)

Antibiotik paling sering diberikan ke lingkungan akuatik atau sebagai lapisan atas pakan ikan. Pengendalian penyakit bakteri dalam akuakultur dapat menyebabkan perkembangan AMR, yang dapat mengancam kesehatan masyarakat karena strain resisten dan gennya dapat menyebar ke manusia dan menyebabkan infeksi resisten antibiotik. Di banyak negara, penggunaan antibiotik yang sembarangan dalam akuakultur telah menimbulkan kekhawatiran karena munculnya bakteri resisten antibiotik, ancaman terhadap keamanan pangan, dan tantangan lingkungan. AMR atau *Antimicrobial Resistance* adalah kondisi di mana mikroorganisme (seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit) tidak lagi merespons obat antimikroba (seperti antibiotik) yang

dirancang untuk membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Ini adalah salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat global.

Dampak resistensi antimikroba (AMR) tidak hanya terbatas pada sektor akuakultur. Resistensi antimikroba (AMR) merupakan ancaman global yang serius bagi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Bakteri resisten antibiotik yang berkembang di lingkungan akuakultur dapat menyebar ke manusia melalui konsumsi produk akuakultur yang terkontaminasi, kontak langsung dengan air atau sedimen yang terkontaminasi, atau melalui transfer gen resistensi ke bakteri patogen manusia. Hal ini dapat menyebabkan infeksi yang lebih sulit diobati, biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi, dan peningkatan angka kematian.

Mengingat dampak resistensi antimikroba (AMR) yang signifikan, monitoring dan evaluasi resistensi antimikroba (AMR) dalam akuakultur menjadi sangat penting. Monitoring dan evaluasi resistensi antimikroba (AMR) memungkinkan kita untuk memahami tingkat dan tren resistensi antimikroba (AMR) pada bakteri dari akuakultur, mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan dan penyebaran resistensi antimikroba (AMR), dan mengembangkan strategi pengendalian yang efektif. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi resistensi antimikroba (AMR) secara teratur, kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi penggunaan antibiotik, mencegah penyebaran resistensi antimikroba (AMR), dan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel) di triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14. Capaian IKU Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut							
Nama Indikator : Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (sampel)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)	Target	% Capaian			
10	12	120	50	24	9	133.33%	216

Capaian Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 120%. Hal ini didukung dengan realisasi rencana aksi

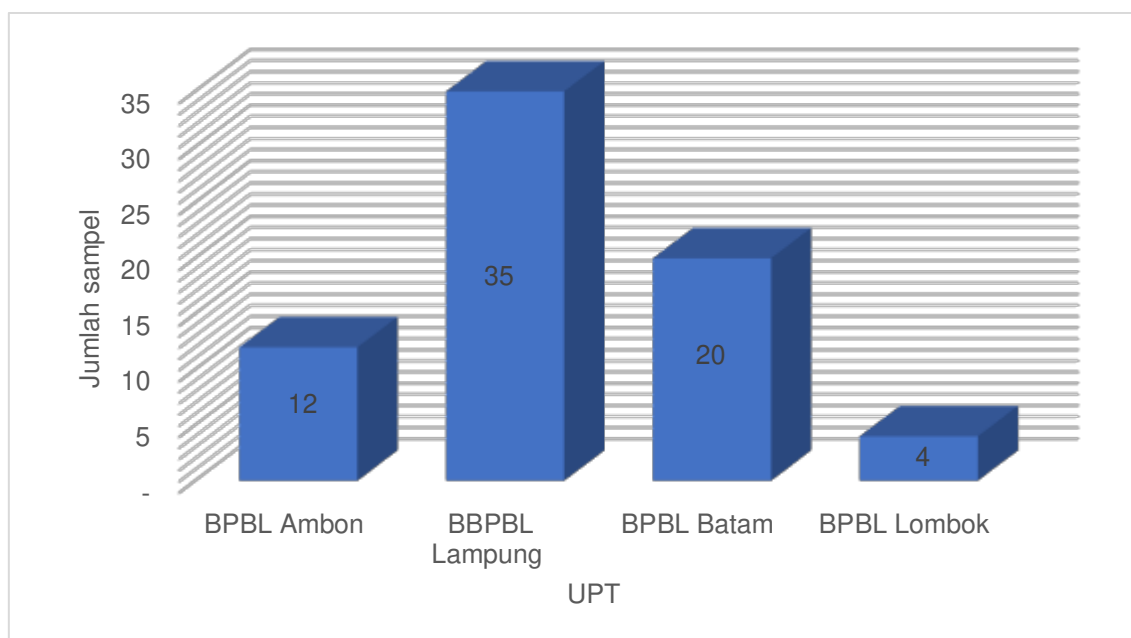
berupa Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR)/Surveilans *Antimicrobial Use* (AMU) yang telah diujikan sampai dengan bulan Maret 2026 diuji sebanyak 12 sampel atau tercapai 120,00%.

Realisasi target sampel yang diuji adalah Kakap putih sebanyak 5 sampel dan ikan kuwe sebanyak 7 sampel. Adapun hasil uji sampel AMR pada Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil uji sampel AMR pada Triwulan I tahun 2026

No.	Komoditas	Lokasi sampling	Target bakteri	Hasil Identifikasi		Hasil Uji AST
				Positif	negatif	
1.	Kakap putih	Kab. Maluku Tengah	<i>Vibrio alginolyticus</i>	2	3	- NV : 1 sensitive, 1 Intermediate - OTC : 2 Sensitive
2.	Bubara	Kab. Maluku Tengah	<i>Vibrio alginolyticus</i>	1	6	- NV : 1 Intermediate - OTC : 1 Sensitive

Perbandingan Kinerja



Grafik 9. Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Pengujian Sampel AMR diuji oleh Satker Laut pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan capaian yang relatif bervariasi, Pengujian Sampel AMR yang diuji Satker Laut pada triwulan pertama tahun 2026 tertinggi capai oleh BBPBL Lampung sebanyak 35 sampel, disusul BPBL Batam sebanyak 20 sampel, lalu BPBL Ambon sebanyak 12 sampel dan terakhir BPBL Lombok sebanyak 4 sampel yang telah diuji.

Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir triwulan ini terealisasi sebesar Rp. 32.949.000 dari pagu anggaran senilai Rp. 32.949.000 atau sebesar 100%. Anggaran digunakan untuk pengadaan pemenuhan stok bahan uji laboratorium.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Tercapaian target kegiatan menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik. lokasi budidaya sebagai sasaran sampling relative terjangkau dan komunikasi pokdakan berjalan dengan baik. disamping itu ketersediaan alat, bahan uji dan tenaga laboratorium yang memadai memperlancar kegiatan ini.

Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan kedepan dengan melakukan kegiatan IKU ini sesuai perencanaan dengan mengunjungi lokasi budidaya dan menguji sampel penyakit ikan terkait sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR)/Surveilans *Antimicrobial Use* (AMU) yang dikumpulkan sesuai metode uji di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon.

SASARAN KEGIATAN III : TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR

IKU 8 : Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBL Ambon (Unit)

Penyediaan peralatan pendukung pengujian penyakit (parasit, mikrobiologi, virus, biomolekuler) dan kualitas lingkungan untuk mendukung budidaya laut. Alat-alat tersebut digunakan untuk analisis sampel, termasuk monitoring AMR (Antimicrobial Resistance). Kegiatan ini juga mendukung pelaksanaan akreditasi laboratorium yang dilakukan.

IKU Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBL Ambon (Unit) merupakan salah satu IKU baru. Perhitungan capaian IKU ini dilakukan pada akhir tahun dengan melihat peralatan laboratorium untuk pengujian sampel penyakit dan lingkungan yang telah tersedia. Capaian IKU ini di triwulan I dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 16. Capaian IKU Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBL Ambon (Unit)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar							
Nama Indikator : Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBL Ambon (Unit)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (unit)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)	Target	% Capaian			
0	0	0	1	0	0	0%	15

SASARAN KEGIATAN IV : TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA RUMPUT LAUT

IKU 9 : Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)

Rumput laut Kotoni adalah salah satu komoditas unggulan dibidang perikanan dan kelautan Indonesia karena jenis rumput laut ini menghasilkan karagenan yang bernilai ekonomis tinggi. Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid dari polisakarida rantai panjang yang diperoleh dari hasil ekstraksi rumput laut dengan menggunakan air panas atau larutan alkali pada temperatur tinggi. Rumput laut penghasil karagenan disebut rumput laut karaginoFit, yang terdiri dari jenis *Kappaphycus* sp, *Euchema* sp, *Chondrus* sp, *Hypnea* sp dan *Gigartina* sp. Dalam industr dan perdagangan, karagenan memberikan manfaat antara lain dalam industri farmasi, makanan, dan kosmetik sebagai stabilizer, bahan pengental (thickener), pembentuk gel (gelling agent) dan pengemulsi, (Parenrengi et.al. 2011).

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Capaian IKU Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon di triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

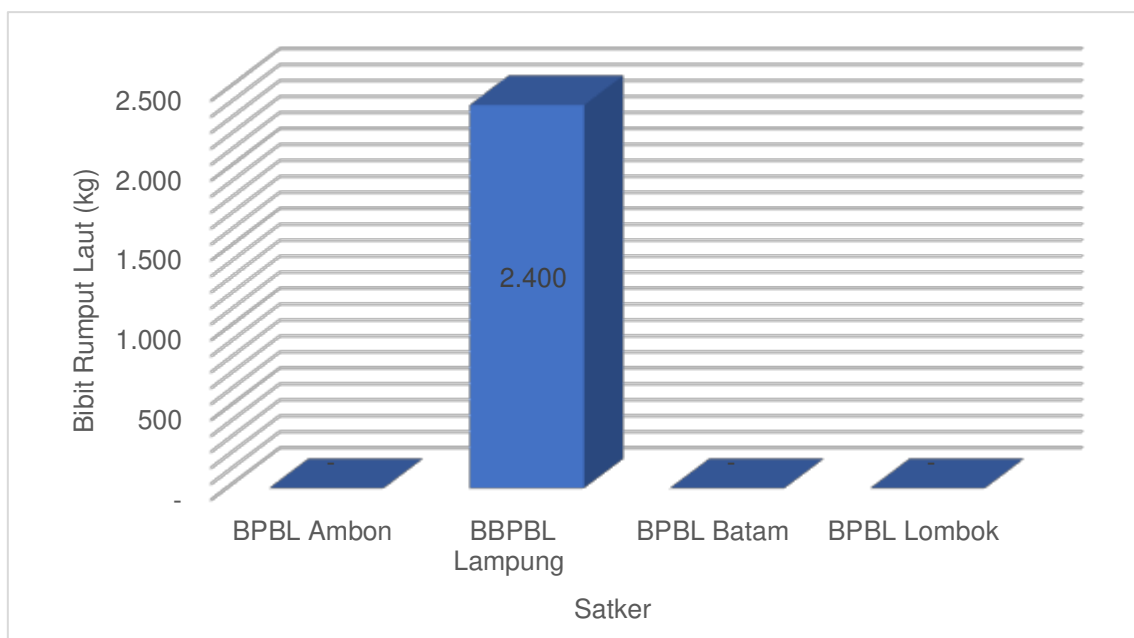
Tabel 17. Capaian IKU Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut							
Nama Indikator : Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (kg)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB (unit)
Triwulan I			Tahunan				
Target (kg)	Realisasi (kg)	Capaian (%)	Target (Kg)	% Capaian			
0	0	0	6.801	0	500	0%	62.231

Pada triwulan ini tidak ada bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat. Kegiatan masih difokuskan pada proses produksi bibit rumput laut baik di skala laboratorium maupun massal di area produksi serta menginventaris kelengkapan dokumen administrasi calon penerima bantuan bibit rumput laut.

Perbandingan Kinerja

Capaian kinerja IKU kegiatan ini sebesar 0% tergolong rendah bila dibandingkan dengan capaian triwulan I di tahun 2025. Hal ini dikarenakan di tahun ini adanya perencanaan untuk mengutamakan produksi rumput laut terlebih dahulu, sedangkan proses distribusi akan mulai dilaksanakan pada triwulan berikutnya.



Grafik 10. Capaian IKU Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker Laut pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan capaian yang relatif bervariasi, Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker Laut pada triwulan pertama tahun 2026 hanya BBPBL Lampung yang menunjukkan capaian yaitu sebanyak 2.400 kg, sedangkan BPBL Batam, BPBL Ambon dan BPBL Lombok belum ada capaian di triwulan ini.

Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir triwulan ini terealisasi sebesar Rp. 186.638.242 dari pagu anggaran senilai Rp. 802.110.000 atau sebesar 23,37%. Anggaran digunakan untuk pengadaan peralatan

kerja kebun bibit rumput laut dan bahan baku seperti mikropopagul dan bahan kimia yang digunakan dalam laboratorium kultur jaringan.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Kegiatan produksi rumput laut kultur jaringan skala laboratorium dan massal telah berjalan dengan baik. Faktor pendukung terhadap keberhasilan antara lain penerapan SOP pemeliharaan rumput laut dengan baik dan didukung kondisi perairan yang relatif baik

Rencana Tindak lanjut

Pada triwulan berikutnya selain tetap melaksanakan kegiatan produksi rumput laut kultur jaringan juga direncanakan mulai melakukan kegiatan penyaluran bantuan bibit rumput laut kultur jaringan kepada penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan dan lokasi, peralatan budidaya rumput laut penerima telah sesuai untuk melakukan kegiatan budidaya rumput laut.

SASARAN KEGIATAN V : TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON

IKU 10 : Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)

AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Yang melatar belakangi penyusunan AKIP adalah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Capaian IKU Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Capaian IKU Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (nilai)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	% Capaian			
0	0	0	84.2	0	0	0%	84.2

Penilaian Capaian IKU ini akan dihitung di akhir tahun 2026 sedangkan progress tahapan yang dilakukan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2026 mencakup:

1. Laporan Kinerja Triwulanan
2. Rencana Aksi Triwulanan
3. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan
4. Rincian Target IKU tahun 2026
5. Perjanjian Kinerja tahun 2026
6. Renja
7. Manual IKU
8. Dialog Kinerja Organisasi

Dalam proses pencapaian IKU ini belum ada penggunaan anggaran secara khusus, proses difokuskan dalam pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam evaluasi SAKIP dan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan : (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja.

IKU 11 : Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan budidaya, salah satu pendorong utamanya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional. Di samping itu, SDM juga merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, kompeten, serta memiliki daya saing tinggi dalam era globalisasi. Oleh sebab itu, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan

oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budi Daya yang kompeten dan profesional.

SDM yang berintegritas dan berkompotensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Pengangkatan seorang pegawai di dalam jabatan struktural diharapkan sesuai dengan kompetensinya sehingga prinsip the right man and the right place dapat terpenuhi. Hal ini dapat dicapai apabila pengangkatan dalam jabatan struktural berpedoman pada Standar Kompetensi Manajerial (SKM), dimana SKM menggambarkan jenis dan level kompetensi yang diperlukan bagi suatu jabatan, sehingga pelaksanaan tugas suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan agregasi dari indeks kompetensi (membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/assessment dari asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMENSJ/2014), persentase capaian output SKP, persentase tingkat kehadiran dan kepatuhan pejabat terhadap LHKPN/LHKASN, serta data tambahan berupa persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan nilai Human Capital Development Plan (HCDP).

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN KKP merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
- c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel 19. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon							
Nama Indikator : Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (indeks)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (indeks)	Realisasi (indeks)	Capaian (%)	Target (indeks)	% Capaian			
0	0	0	81,5	0	0	0%	81,5

Gambar 7. Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Capaian IKU ini dihitung tiap semester. Belum ditemukan permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini, karena kegiatan peningkatan kompetensi pegawai saat ini dapat dipenuhi dari kegiatan kegiatan bimtek dan sejenisnya secara daring. Beberapa tujuan dari Bimbingan Teknis Secara Umum, meliputi Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia, Koordinasi yang lebih baik, Peningkatan kinerja institusi dan organisasi untuk menunjang keberhasilan suatu institusi, Memiliki kompetensi untuk secara optimal melaksanakan tugas jabatan yang diduduki dan Memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai disesuaikan dengan tugas dan jabatannya sehingga indeks profesionalitas dapat ditingkatkan.

IKU 12 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah kerja PKA meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan analisa data/bukti audit sesuai teknik audit, pengembangan temuan audit. Adapun proses pelaksanaan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan bukti audit
- Pengujian bukti audit
- Kertas kerja audit
- Penyusunan dan temuan audit

Temuan audit adalah masalah masalah penting serta memiliki dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan audit harus mengandung unsur temuan yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh auditor, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat.

Temuan audit harus mendapatkan tanggapan dari pihak auditi. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil audit yaitu:

- Judul, mencerminkan uraian substansi temuan
- Informasi, masukan informasi yang penting dan relevan dengan temuan
- Obyektif, yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan
- Kenali pendapat penting
- Yakin
- Kalimat konstruktif, bersifat membangun dan tidak kualitatif serta untuk perbaikan dimasa datang
- Pengakuan, apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen
- Jujur
- Pengendalian manajemen, utamakan pembahasan pengendalian manajemen disetiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan
- Pengaruh negative, jelaskan pengaruh negative yang sudah terjadi
- Penyebab hakiki, tunjukan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya masalah
- Ringkas, uraian permasalahan singkat dan jelas
- Bahasa sederhana.

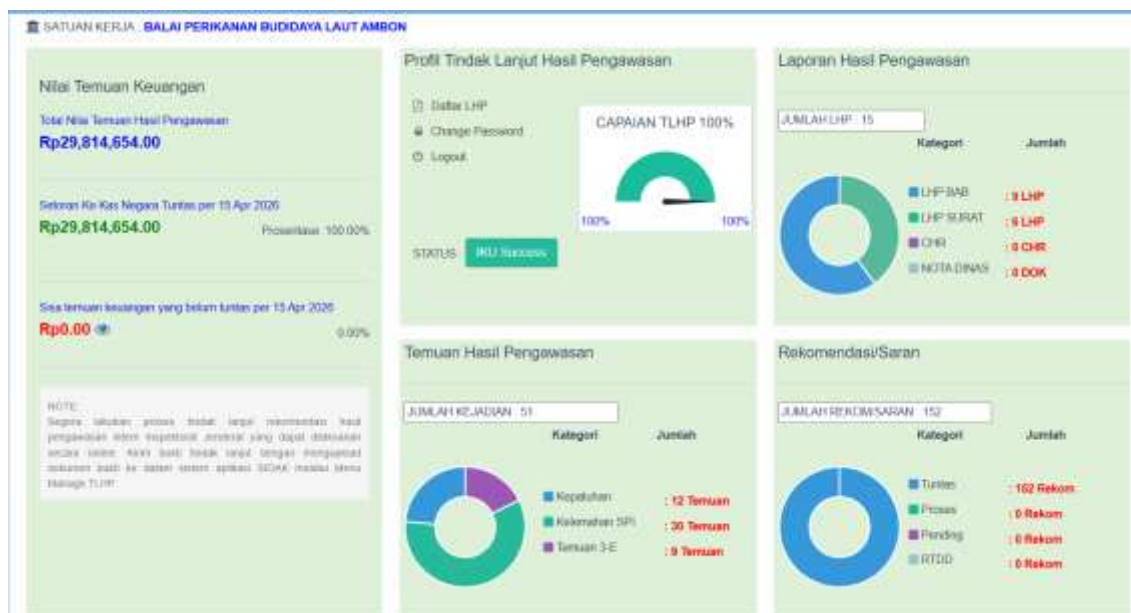
Capaian Kegiatan

Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen) di triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (%)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	% Capaian			
86	97.46	113.33	86	113.33	92.86	104.95%	86

Capaian IKU ini merupakan hasil perhitungan Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen terhadap hasil temuan dan rekomendasi pada Satker Lingkup DJPB yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 1 Maret 2026 (Triwulan I Tahun 2026).



Gambar 6. Tangkapan layar aplikasi SIDAK

Perbandingan Kinerja

Balai perikanan budidaya laut ambon memperoleh capaian 97,46% yang lebih tinggi bila dibandingkan capaian triwulan I tahun 2025. Pada Aplikasi Sidak, BPBL Ambon telah tuntas 100% dalam menindak lanjuti temuan dan rekomendasi yang ada. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian satker lain pada tahun ini menunjukkan bahwa nilai yang sama dengan sebagian besar unit kerja di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebesar 97,46% (tuntas 115 dari 118 rekomendasi).

Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun IKU ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapaian realisasi dari Sasaran Kegiatan di triwulan ini adalah Rp. 3.573.132.773 atau 24,25% dari pagu anggaran Rp. 14.732.968.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon pada triwulan ini meliputi penyelesaian tindak lanjut atas temuan/sisa rekomendasi LHP Itjen KKP yang telah diselesaikan tepat waktu dan diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIDAK).

Rencana Tindak lanjut

Sampai dengan akhir triwulan ini, belum ada lagi audit internal yang dilaksanakan di BPBL Ambon, sehingga tidak ada temuan/rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan di BPBL Ambon. Kegiatan yang dilaksanakan di BPBL Ambon dilaksanakan sesuai juknis dan peraturan untuk menghindari adanya kesalahan administrasi maupun keuangan.

IKU 13 : Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan langkah pertama dalam mewujudkan suatu system pemerintahan atau organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan reformasi birokrasi ini tidak lain adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat secara tepat, cepat dan efisien, namun pada saat pelaksanaannya sering ditemukan beberapa kendala seperti penyalahgunaan wewenang, adanya indikasi KKN dan masih lemahnya fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Grand design reformasi birokrasi tertuang pada Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 yang menjelaskan tiga sasaran utama yakni peningkatan kapasitas, akuntabilitas organisasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Untuk

membantu mewujudkan tiga sasaran tersebut maka diperlukan suatu project kongkret melalui pembangunan zona integritas di setiap instansi.

Zona Integritas menurut Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan public. Sedangkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas layanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang berintegritas, khususnya di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien.

Capaian IKU Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon dilakukan di akhir tahun. Adapun capaian di akhir triwulan I ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 21. Capaian IKU Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (nilai)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	% Capaian			
0	0	0	76	0	0	0%	77

IKU 14 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah gambaran tingkat keberhasilan satuan kerja di dalam kegiatan pelaksanaan anggaran. Untuk mengukur tingkat indeks kinerja pelaksanaan anggaran IKPA dalam pengelolaan dana APBN yang terdiri dari :

1. Aspek kesesuaian dengan perencanaan
2. Aspek kepatuhan terhadap regulasi
3. Aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan
4. Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan

Capaian IKU ini dilakukan disetiap akhir semester sehingga di triwulan I belum ada realisasi capaian kegiatan IKU ini.

Tabel 22. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon							
Nama Indikator : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (nilai)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	% Capaian			
0	0	0	92.1	0	0	0%	92.1

IKU 15 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon dapat ditingkatkan melalui pengelolaan komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku terus dilakukan secara periodik bulanan untuk mendukung indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon berupa pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI oleh Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Tabel 23. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (nilai)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	% Capaian			
0	0	0	71.75	0	0	0%	81.75

Proses pencapaian kinerja perencanaan anggaran dilakukan pada akhir tahun berjalan. Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini. Data kinerja anggaran BPBL Ambon mengacu pada perhitungan di tingkat eselon I. Data yang dimuat merupakan data adopsi langsung pada aplikasi Smartkeu.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan anggaran dimana pemenuhan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran guna pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

IKU 16 : Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)

Administrasi kepegawaian negara adalah pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Dapat juga dikatakan, administrasi kepegawaian negara merupakan proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja, dan tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi kepegawaian dalam instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan. Lingkup kegiatan administrasi kepegawaian, antara lain meliputi penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian

tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tupoksi dari pengelola kepegawaian:

1. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
2. Membuat Daftar Absen dan Rekap
3. Menyusun Acara pelantikan Sumpah Jabatan.
4. Mengusulkan kenaikan Pangkat dan Jabatan.
5. Mengusulkan pensiun Pegawai / Janda.
6. Menyusun DUK PNS dan Bezeting.
7. Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
8. Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
9. Membuat Surat Kenaikan Gaji Berkala.
10. Membuat BA. Sumpah Pejabat Fungsional/Pejabat Struktural/PNS.
11. Membuat KP4 Pegawai.
12. Membuat daftar Nominatif Pegawai.
13. Mengetik Surat Keluar/SKP Pegawai/Surat Tugas.
14. Memberikan laporan kegiatan kepada atasan.

Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon dilakukan pada akhir tahun 2026 sehingga belum ada realisasi IKU di triwulan I.

Tabel 24. Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon							
Nama Indikator : Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (indeks)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (indeks)	Realisasi (indeks)	Capaian (%)	Target (indeks)	% Capaian			
0	0	0	4	0	0	0%	0

Pencapaian dan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun 2026. Belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan pengelolaan kepegawaian berdasarkan aturan yang berlaku. Rencana aksi dalam proses pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan validasi data kepegawaian secara berkala dan dilaporkan secara berjenjang kepada SDMAO Eselon 1.

IKU 17 : Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pemerintah dan badan publik. Menurut para pakar, hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, informasi publik adalah kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, termasuk pemerintahan, lembaga publik, dan badan publik lainnya. Informasi publik mencakup berbagai jenis informasi yang wajib diungkapkan, seperti informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan, kinerja, keuangan, dan kegiatan badan publik.

Tabel 25. Deskripsi Jenis Informasi Publik

No.	Jenis Informasi	Deskripsi
1.	Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Informasi ini meliputi informasi tentang profil badan publik, program dan kegiatan, peraturan, keputusan, kebijakan, laporan kinerja, dan laporan keuangan
2.	Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta	Informasi ini adalah informasi yang apabila tidak segera disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Contohnya informasi tentang bencana, keadaan darurat, atau situasi yang bersifat urgensi.
3.	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	Informasi ini adalah informasi yang sudah dikuasai dan didokumentasikan oleh badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat atas permintaan.
4.	Informasi Yang Dikecualikan	• Rahasia Negara, Informasi yang menyangkut pertahanan, keamanan, dan ketahanan ekonomi. • Rahasia Pribadi: Informasi tentang data pribadi seseorang yang tidak dapat diakses tanpa izin. • Rahasia Bisnis: Informasi yang bersifat rahasia dan dapat merugikan persaingan usaha yang sehat. • Informasi yang Belum Dipastikan Kebenarannya: Informasi yang masih dalam proses pemeriksaan atau penyelidikan.

Regulasi yang mengatur keterbukaan informasi public lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di

Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Indikator ini merupakan salah satu indikator baru dalam perjanjian kinerja 2026, memiliki target sebesar 81 dan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

Tabel 26. Capaian IKU Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon							
Nama Indikator : Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (nilai)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	% Capaian			
0	0	0	81	0	0	0%	0

IKU 18 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip sangat penting dalam pengamanan aset Institusi dan sebagai bahan pembuktian baik secara *de facto* maupun/ *de jure*.

Output tindak lanjut pengawasan arsip adalah melahirkan pengelolaan arsip baik secara fisik, isi informasi utuh dan terkoneksi secara online. Pengelolaan secara fisik dan elektronik perlu dilakukan secara komprehensif. Pengelolaan arsip butuh komitmen dari pimpinan & konsistensi pelaksana. Tindak lanjut adalah perlu sinergi & sinkronisasi dalam pengelolaan arsip dalam tingkat teknis diantara perlunya bintek-bintek pemberkasan. Dalam pengelolaan Arsip Dinamis membutuhkan SDM, Sarana & Prasarana, dan sumber daya lain. Empat pilar pengelolaan arsip dinamis yang harus dilakukan organisasi kerja yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, JRA, Sistem Klasifikasi Keamanan.

Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon dilakukan di akhir tahun.

Tabel 27. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (nilai)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	% Capaian			
0	0	0	81	0	0	0%	81

IKU 19 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BPBL Ambon (Persen)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, setiap Pengguna Anggaran (PA) wajib menyusun dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara transparan. Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) hadir sebagai sarana teknologi informasi resmi yang dikelola oleh LKPP untuk memfasilitasi pengumuman tersebut, guna memastikan prinsip keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan optimal.

Dalam rangka mendukung program pencegahan korupsi terintegrasi dan pemenuhan indikator kinerja RUP menjadi salah satu parameter utama. Laporan pelaksanaan kegiatan ini disusun untuk mengevaluasi efektivitas input data, validasi paket, hingga penayangan RUP secara nasional. Capaian indikator kinerja pada SIRUP mencerminkan komitmen unit kerja satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dalam mendukung integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya negara.

Capaian Kegiatan

Tabel 28. Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BPBL Ambon (Persen)

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BPBL Ambon (Persen)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (%)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	% Capaian			
77	100	129.87	77	120	0	0%	77

Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BPBL Ambon sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2026 sebanyak 100%, melebihi target triwulan sebesar 77%. Kegiatan IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian di triwulan I tahun 2025.

Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun IKU ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapaian realisasi dari Sasaran Kegiatan di triwulan ini adalah Rp. 3.573.132.773 atau 24,25% dari pagu anggaran Rp. 14.732.968.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Indikator ini menjadi bagian integral dari rencana umum pengadaan, yang mencakup jadwal, spesifikasi, dan estimasi biaya. Dengan indikator yang tepat, rencana ini dapat disesuaikan secara dinamis, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan. Pengumuman indikator rencana umum pengadaan di SIRUP dilakukan secara daring dan terbuka, sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prosesnya meliputi:

- ✓ Tahapan Pengumuman: Instansi pemerintah mengunggah rencana umum pengadaan beserta indikatornya ke SIRUP. Pengumuman ini mencakup detail seperti kode paket, nilai estimasi, dan indikator kinerja utama.
- ✓ Manfaat Pengumuman: Dengan pengumuman ini, kegiatan penyusunan indikator menjadi lebih inklusif, memungkinkan partisipasi luas dalam proses pengadaan.
- ✓ Pemantauan dan Pelaporan: SIRUP menyediakan fitur pelaporan otomatis berdasarkan indikator, sehingga kegiatan dapat dipantau secara berkala.

IKU 20 : Persentase Layanan Perkantoran (Persen)

Layanan perkantoran bukan sekadar aktivitas pendukung (*supporting function*), melainkan fondasi yang memastikan seluruh proses bisnis inti organisasi berjalan tanpa hambatan. Di era transformasi digital saat ini, standar kualitas layanan perkantoran mengalami pergeseran dari sekadar pemenuhan kebutuhan fisik menuju optimalisasi proses yang cepat, akurat, dan transparan. Oleh karena itu, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi instrumen krusial untuk menerjemahkan visi strategis organisasi ke dalam aksi operasional yang dapat diukur secara objektif.

IKU Layanan Perkantoran adalah parameter keberhasilan operasional unit administrasi yang mencakup pengelolaan tata usaha, sarana prasarana, dan sumber daya kantor, yang diukur melalui tingkat ketepatan waktu, efisiensi anggaran, dan tingkat kepuasan pengguna layanan

IKU ini berfokus pada efisiensi internal dan kualitas layanan pendukung. Hal-hal yang diukur biasanya meliputi:

- Ketepatan Waktu: Seberapa cepat proses administrasi diselesaikan (surat menyurat, pengadaan, laporan).
- Akurasi: Seberapa rendah tingkat kesalahan dalam pengelolaan data atau dokumen.
- Kualitas Layanan: Kepuasan pengguna internal (pegawai) terhadap lingkungan dan fasilitas kerja.

Capaian Kegiatan

Tabel 29. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran (Persen)

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Layanan Perkantoran (Persen)							
Tahun 2026					Capaian di Triwulan I Tahun 2025 (%)	Perbandingan Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025	Target Sasaran Jangka Menengah DJPB
Triwulan I			Tahunan				
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	% Capaian			
100	100	100	100	100	0	0%	

Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran satker BPBL Ambon (Persen) sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2026 sebanyak 100%, sehingga target capaian kinerja untuk IKU ini telah mencapai target triwulanan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2026. Kegiatan IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian di triwulan I tahun 2025.

Secara umum pemenuhan nilai indeks Kepuasan Layanan Internal mencakup dukungan administrasi, kebutuhan IT dan sarana pendukung lainnya telah tercapai 100%. Data terkait pencapaian indeks tersebut tersaji pada tabel berikut:

Tabel 30. Layanan Internal satker BPBL Ambon

No	Jenis Pelayanan Internal	Penjelasan	Keterangan
1.	Layanan Administrasi Internal dan Persuratan	Kebutuhan dokumen dalam kegiatan kepegawaian, antara lain untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pelaksanaan cuti, dokumen usulan ujian kompetensi, pencantuman gelar, pengusulan peningkatan kompetensi pegawai	Seluruh kebutuhan layanan administrasi internal telah tuntas atau 100%
2.	Layanan IT	Kebutuhan dan dukungan IT dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, seperti Wifi yang mencakup seluruh area BPBL	Seluruh kebutuhan layanan IT telah tuntas atau 100%

No	Jenis Pelayanan Internal	Penjelasan	Keterangan
		Ambon, penggunaan kanal media interaktif dalam mendukung tugas dan fungsi, penggunaan aplikasi kinerja dan pelayanan stakeholder sudah berbasis IT	
3.	Dukungan Logistik	Dukungan kebutuhan logistic atau sarana pendukung tugas pokok dan fungsi satker BPBL Ambon	Kebutuhan sarana logistic dalam pelaksanaan tugas dan fungsi telah terpenuhi atau 100%.

Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun IKU ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapaian realisasi dari Sasaran Kegiatan di triwulan ini adalah Rp. 3.573.132.773 atau 24,25% dari pagu anggaran Rp. 14.732.968.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Tercapainya target IKU menunjukkan pelaksanaan Layanan Perkantoran satker BPBL Ambon di Triwulan I telah sesuai perencanaan dan alur proses yang telah ditetapkan. Pegawai yang melaksanakan IKU ini telah memahami dan menjalankan tugas masing-masing dengan baik.

Rencana Tindak lanjut

Evaluasi ini dilakukan dengan fokus pada empat dimensi utama: ketersediaan fisik, kondisi teknis, aksesibilitas, dan dampak terhadap tupoksi. Data dikumpulkan melalui survei wawancara kepada pegawai lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi fasilitas, mengidentifikasi kekurangan, dan mendorong investasi yang tepat sasaran untuk meningkatkan kinerja organisasi.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN 2026 pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah sebesar Rp. 27.439.723.000 berdasarkan data dari aplikasi myintress, realisasi anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai bulan Maret 2026 telah tercapai sebesar Rp. 5.010.930.137 atau sebesar (18,26%). Pembagian alokasi pagu

anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tersebut menurut jenis belanja yaitu: (i) Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.516.007.031 (ii) Belanja Barang sebesar Rp 2.494.923.106; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp 0.

Tabel 31. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja di triwulan I pada Tahun 2026 dan 2025

Jenis Belanja	Triwulan I Tahun 2026			Triwulan I Tahun 2025		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pegawai	11.807.225.000	2.516.007.031	21,31	9.385.610.000	2.297.320.438	24,48
Barang	15.632.498.000	2.494.923.106	15,96	15.179.660.000	1.980.628.721	13,05
Modal	0	0	0	265.000.000	0	0
Total	27.439.723.000	5.010.930.137	18,26	24.830.270.000	4.277.949.159	17,23

Persentase anggaran belanja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2026 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Barang.

Penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ditujukan untuk memenuhi target beberapa program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi utama. Pada triwulan I di tahun 2026, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memiliki beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh anggaran yang memadai. Berikut adalah sasaran strategis dan indikator kinerja utama beserta dukungan anggaran:

Tabel 32. Data realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas Triwulan I tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan 2026	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran TW I	Keterangan
1.	Terkelolanya Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	26 unit	6.100.000.000	97.699.142	Anggaran terealisasi 1,60%
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)	1.667 ekor	382.841.000	89.361.600	Anggaran terealisasi 23,34%
		Benih Ikan Laut yang diproduksi oleh BPBL Ambon (Ekor)	46.667 ekor	196.000.000	36.260.000	Anggaran terealisasi 18,50%
		Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	1.088.624 ekor	4.634.955.000	1.585.852.300	Anggaran terealisasi 34,22%
		Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut oleh BPBL Ambon (Sampel)	700 sampel	185.735.000	49.167.430	Anggaran terealisasi 26,47%

No.	Sasaran Kegiatan 2026	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran TW I	Keterangan
		Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)	60 sampel	71.436.000	0	Anggaran terealisasi 0%
		Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BPBL Ambon (Sampel)	50 sampel	32.949.000	32.949.000	Anggaran terealisasi 100%
3	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BPBL Ambon (Unit)	1 unit	65.502.000	3.000.000	Anggaran terealisasi 4.58%
4.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	6.801 kg	802.110.000	186.638.242	Anggaran terealisasi 23,27%
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84,2	Belum ada Penganggaran khusus		
		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81,5	Belum ada Penganggaran khusus		
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	86%	Belum ada Penganggaran khusus		
		Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	76	Belum ada Penganggaran khusus		
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92,1	Belum ada Penganggaran khusus		
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	71,75	Belum ada Penganggaran khusus		
		Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	4	Belum ada Penganggaran khusus		
		Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	≥81	Belum ada Penganggaran khusus		

No.	Sasaran Kegiatan 2026	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran TW I	Keterangan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	81%	Belum ada Penganggaran khusus		
		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BPBL Ambon (Persen)	77%	Belum ada Penganggaran khusus		
		Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	100%	Belum ada Penganggaran khusus		

3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Efisiensi merupakan ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu, dan biaya), yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang telah ditetapkan. Akan dikatakan efisien jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Evaluasi terhadap penggunaan anggaran direalisasikan serta analisis capaian kinerja dari sasaran strategis. Pencapaian program prioritas Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon merupakan bagian sasaran kegiatan yakni pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam upaya melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah melakukan beberapa upaya dalam pencapaian target kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun secara umum penggunaan anggaran di triwulan pertama tahun 2026 menunjukan selisih cukup kecil antara nilai pagu dan realisasi anggaran.

Upaya – upaya yang telah dilakukan adalah:

- Penggunaan aplikasi media seperti Zoom, Google Meet atau video call via aplikasi whatsapp merupakan aplikasi gratis dalam video conference yang dapat diaplikasikan dengan mudah, hal ini biasanya digunakan dalam koordinasi kegiatan prioritas dengan stakeholder terkait, maupun pelaksanaan seminar, bimtek maupun workshop bagi peningkatan kapasitas SDM BPBL Ambon.
- Melakukan perhitungan secara cermat terhadap kebutuhan bahan pendukung produksi sehingga ketersediaanya mencukupi.

1.1. Simpulan

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada Triwulan I Tahun 2026 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pencapaian target kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai target.

1.2. Permasalahan/Kendala dihadapi

Pada triwulan pertama tahun 2026, belum ada kendala dalam proses pencapaian indikator kinerja utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan di awal tahun, disiasati dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kegiatan dan pengaturan sumber daya manusia yang fleksibel dan dengan memperhatikan beban pekerjaan sehingga tidak mempengaruhi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Memasuki triwulan kedua akan diperkirakan terjadi peralihan musim yang dapat mempengaruhi kegiatan budidaya terutama di kegiatan budidaya ikan di keramba jaring apung yang sangat dipengaruhi perubahan parameter lingkungan sekitar. Penanganan kendala teknis seperti masih ditemukannya sarana produksi dan filterisasi media yang kurang maksimal yang berdampak pada kurang optimalnya kegiatan dan kualitas media pemeliharaan yang siap digunakan dalam proses pemeliharaan ikan, banyaknya serangan ektoparasit dan bakteri, menurunnya kualitas media pemeliharaan dan terjadi blooming protozoa tertentu di perairan akibat perubahan parameter lingkungan secara signifikan namun realisasi bantuan masih dapat memenuhi target.

1.3. Langkah Perbaikan

Beberapa upaya telah dilakukan dalam memenuhi pencapaian target IKU yang menjadi tugas utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Langkah perbaikan yang dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan pengotimalisasi sarana perbenihan ikan laut sebagai langkah efisiensi anggaran dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk memproduksi benih ikan laut.
- Melakukan penempatan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan beban pekerjaan.
- Telah dilakukan perawatan sarana dan prasarana produksi untuk menjamin kelancaran kegiatan.
- Telah menginstruksikan kepada pegawai untuk menjalankan Standar Operasional Prosedur dengan baik dan benar.
- Melakukan pengujian sampel air dan komoditas secara berkala pada semua fasilitas budidaya yang dimiliki.
- Meningkatkan koordinasi dan promosi kepada stekholder ketersediaan komoditas untuk meningkatkan nilai PNBP balai di waktu kedepan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan pertama ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi BPBL Ambon, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal laporan kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders* /mitra kerja, sehingga kontribusi BPBL Ambon dalam pembangunan perikanan budidaya dapat lebih ditingkatkan.